



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
INSPEKTORAT
KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2020**





Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmad-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 dibuat dan disampaikan sehubungan dengan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan surat Bupati Sintang Nomor : 065 / 0330 / ORTAL - C tanggal 22 Januari 2021 perihal Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja tahun 2021.

Penyusunan dan Pelaporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sintang dimaksudkan untuk memberikan gambaran konkrit atas apa yang telah dilaksanakan selama tahun 2020, yang menyangkut keberhasilan/ kegagalan serta hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2021 yang telah disusun, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi Inspektorat Kabupaten Sintang dalam meningkatkan Kinerja Pengawasan.



Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun 2020 ini dibuat sebagai bahan evaluasi lebih lanjut.

Sintang, Maret 2021

Plt. INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG,



Dra. ARDATIN

Pembina Tingkat I

NIP. 19650926 199202 2 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

LKjIP Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun 2020 melaporkan Capaian Kinerja (*Performance Results*) dengan tetap mengacu pada rencana strategis Inspektorat Kabupaten Sintang Periode 2017-2021. (*Performance Plan*) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sintang dengan capaian 7 (tujuh) sasaran strategis, dengan capaiannya dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Tingkat Capaian Sasaran			
		SB	B	CB	TB
1	Meningkatnya Profesionalisme dan kapasitas Aparat Pengawas.		83,55		
2	Meningkatnya Jumlah Regulasi/kebijakan pengawasan yang diterbitkan.	250			
3	Meningkatnya Penyelesaian Tindak lanjut Temuan hasil pemeriksaan.			67,22	
4	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawasan berkala.	210			
5	Meningkatnya penyelesaian jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.			60,1	
6	Meningkatnya Hasil evaluasi SAKIP SKPD.				47,37
7	Meningkatkan SKPD yang bebas Korupsi.				51,75

Keberhasilan/ketidakberhasilan capaian sasaran strategis diukur dengan IKU yang menggambarkan peran Inspektorat Kabupaten Sintang dalam pencapaian visi dan misi pada tingkat Pemerintah Kabupaten. Pengukuran capaian kinerja meliputi pengukuran realisasi 7 (Tujuh) IKU yang paling berpengaruh capaian sasaran strategis dari 15 (lima belas) IKU yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.



Adapun rincian capaian masing-masing sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Capaian sasaran strategis "Meningkatnya Profesionalisme dan kapasitas Aparat Pengawas." sebesar 83,55% tercermin dalam capaian 2 (dua) IKU dengan kategori **berhasil**.
- 2) Capaian Sasaran strategis "Meningkatnya Jumlah Regulasi/kebijakan pengawasan yang diterbitkan" sebesar 250% tercermin dalam 1 (satu) IKU dengan kategori **sangat berhasil**.
- 3) Capaian Sasaran Strategis "Meningkatnya Penyelesaian Tindak lanjut Temuan hasil pemeriksaan" sebesar 67,22% tercermin dalam 4 (empat) IKU yaitu dengan kategori **cukup berhasil**.
- 4) Capaian Sasaran Strategis "Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawasan berkala" sebesar 210% tercermin dalam 1 (satu) IKU yaitu dengan kategori **sangat berhasil**.
- 5) Capaian Sasaran Strategis "Meningkatnya penyelesaian jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan" sebesar 60,1% tercermin dalam 1 (satu) IKU yaitu dengan kategori **cukup berhasil**.
- 6) Capaian Sasaran Strategis "Meningkatnya Hasil evaluasi SAKIP SKPD" sebesar 47,37% tercermin dalam 2 (dua) IKU yaitu dengan kategori **tidak berhasil**.
- 7) Capaian Sasaran Strategis "Meningkatkan SKPD yang bebas Korupsi" sebesar 51,75% tercermin dalam 4 (empat) IKU yaitu dengan kategori **tidak berhasil**.

Masalah utama yang menjadi penyebab ketidakberhasilan capaian sasaran strategis adalah adanya refocusing anggaran dan realokasi kegiatan sebagai akibat dari pandemi COVID~19, dimana sebagian besar anggaran dialokasikan untuk penanganan dan pencegahan penularan *Corona Virus Disease (COVID)~19*. Selain itu, adanya beberapa masalah yang juga dapat menghambat pencapaian target kinerja sasaran antara lain:

- Masih kurangnya anggaran untuk mengikuti pelatihan teknis bagi setiap auditor/pengawas pemerintah.



- Masih kurangnya tenaga fungsional pemeriksa bila dibandingkan dengan jumlah obyek pemeriksaan.
- Kurangnya sarana prasarana pendukung pelaksanaan pengawasan.
- Lokasi Objek pemeriksaan tersebar di wilayah Kabupaten Sintang.
- Kurangnya kesadaran Objek Pemeriksaan untuk menindaklanjuti temuan-temuan hasil pemeriksaan.
- Belum optimalnya tindak lanjut penyelesaian kasus-kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan.
- Masih kurangnya kebijakan dan prosedur terkait pengawasan sesuai dengan perkembangan permasalahan yang ada

Untuk mengatasi masalah tersebut maka diperlukan langkah-langkah

- Mengirim PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti diklat sertifikasi Jabatan Fungsional maupun diklat struktural dan teknis.
- Mengadakan penambahan sarana dan prasarana pendukung guna menunjang kegiatan pemeriksaan.
- Menyusun Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) sesuai dengan skala prioritas.
- Melaksanakan koordinasi dan pemutahiran data/tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- Meningkatkan koordinasi antara anggota TP-TGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi)



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	Hal i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Sintang	1
B. Maksud dan Tujuan LKjIP 2020	5
C. Permasalahan Utama (<i>STRATEGIC ISSUED</i>)	6
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis Tahun 2017 – 2021	9
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	17
C. Program dan Kegiatan Tahun 2020	19
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Indikator Kinerja	22
B. Realisasi Anggaran Tahun 2020	72
BAB IV : PENUTUP	91
LAMPIRAN –LAMPIRAN	
1. Pengukuran Kinerja Tahun 2020	
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	
3. SK Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG

a. Kedudukan

Sesuai dengan Perda Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 107 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sintang disebutkan bahwa Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati, dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

a) Tugas Pokok

Memperhatikan Peraturan Bupati Sintang Nomor 107 Tahun 2019, Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Sintang adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

b) Fungsi

Lebih lanjut disebutkan Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal kebijakan kepala daerah terhadap :
 - a) Organisasi Perangkat Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya;
 - b) Kecamatan serta Pemerintahan Desa;
 - c) Penanganan pengaduan masyarakat;
 - d) Penanganan Gratifikasi dan *Whistle Blower System*;
 - e) Penanganan Sapu Bersih Pungutan Liar (saber pungli);



- f) Pengawasan atas pelaksanaan LHKPN dan LHKASN;
 - g) Pelaksanaan Investigasi;
 - h) Pelaksanaan reviu;
 - i) Pengawasan khusus/tujuan tertentu atas perintah bupati.
3. Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi/Tim penyelesaian kerugian daerah;
 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 5. Penyusunan LAKIP dan Perjanjian kinerja;
 6. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
 7. Pengembangan Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat;
 8. Perencanaan Program dan Kegiatan Pengawasan;
 9. Pengkoordinasian kesekretariatan, Inspektur Pembantu dan auditor;
 10. Pelaksanaan reviu dan evaluasi
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

c) Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Sintang, terdiri dari:

1. Inspektur
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi; dan
 - c. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
3. Inspektur pembantu Bidang I;
4. Inspektur pembantu Bidang II;
5. Inspektur pembantu Bidang III;
6. Inspektur pembantu Bidang IV;
7. Inspektur pembantu Bidang V; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.



3.Data Kepegawaian , Perlengkapan , dan Sumber Daya Keuangan

a. Kepegawaian

Inspektorat Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 59 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan komposisi sebagai berikut:

(1) Dari segi kepangkatan/golongan ruang, terdiri dari:

- a) Golongan I : - orang
- b) Golongan II : 2 orang
- c) Golongan III : 38 orang
- d) Golongan IV : 19 orang

(2) Dari segi kualifikasi pendidikan formal, terdiri dari:

- a) S2 : 14 orang
- b) S1 : 40 orang
- c) D3 : 2 orang
- d) SLTA : 3 orang
- e) SLTP : - orang
- f) SD : - orang

(3) Dari segi pegawai yang telah mengikuti Diklat PIM, terdiri dari:

- a) SPAMEN/Pim II : - orang
- b) SPAMA/Pim III : 3 orang
- c) ADUM/Pim IV : 3 orang



(4) Dari segi pegawai yang telah mengikuti Diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan lulus sertifikasi Auditor sebanyak 34 orang dan P2UPD sebanyak 9 orang. Dari jumlah tersebut, yang telah memegang Jabatan Fungsional Auditor sebanyak 34 orang, dengan rincian:

- a) Dalnis : 9 orang
- b) Ketua Tim : 16 orang
- c) Auditor Ahli Anggota Tim : 8 orang
- d) Auditor Penyelia : 1 orang

Adapun rincian PNS yang telah bersertifikasi dan telah memegang Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a) Auditor Ahli terdiri dari:
 - Auditor Utama : - orang
 - Auditor Madya : 9 orang
 - Auditor Muda : 16 orang
 - Auditor Pertama : 8 orang
- b) Auditor Terampil terdiri dari:
 - Auditor Penyelia : 1 orang
 - Auditor Pelaksana Lanjutan: 0 orang
 - Auditor Pelaksana : 0 orang
- c) P2UPD
 - P2UPD Madya : 4 orang
 - P2UPD Muda : 3 orang
 - P2UPD Pertama : 2 orang



(5) Dari segi jabatan struktural/Eselon sebagai berikut:

- a) Eselon II : - orang
- b) Eselon III : 5 orang
- c) Eselon IV : 2 orang

b. Perlengkapan

Keberhasilan dalam penyelenggaraan tugas-tugas bidang pengawasan di Kabupaten Sintang tentu harus didukung sarana dan prasarana kerja yang memadai. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia dalam rangka mendukung tugas-tugas pengawasan antara lain:

- (1) Lahan kantor seluas 9.706 m²
- (2) 3 (tiga) buah kendaraan roda 4 (empat)
- (3) 47 (empat puluh tujuh) buah kendaraan roda 2 (dua)
- (4) 29 (dua puluh sembilan) unit computer note-book
- (5) 15 (lima belas) unit computer desktop
- (6) 2 (dua) buah kamera digital
- (7) 4 (empat) buah GPS
- (8) 2 (dua) buah alat ukur jarak
- (9) 5 (lima) buah alat penghancur dokumen

c. Sumber Daya Keuangan

Sumber dana yang digunakan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang menjadi wewenang Inspektorat Kabupaten Sintang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU).

B. MAKSUD DAN TUJUAN LKjIP 2020

Penyusunan dan Pelaporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sintang dimaksudkan untuk memberikan informasi dan gambaran konkrit atas apa yang telah dilaksanakan selama tahun 2020 yang menyangkut keberhasilan atau kegagalan serta hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2021 yang telah disusun



sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan bagi Inspektorat Kabupaten Sintang dalam meningkatkan kinerja pengawasan.

C. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

1. Kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Sintang, meliputi :

Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

- a. Masih terdapat temuan hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti;
- b. Potensi penyimpangan penggunaan anggaran yang berindikasi terjadi tindak pidana korupsi;
- c. Kurangnya transparansi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Analisis Isu Strategis Inspektorat Kabupaten Sintang

Secara internal Inspektorat Kabupaten Sintang memiliki Kekuatan (*Strengths*) dan Kelemahan (*Weakneses*) dan secara eksternal Inspektorat Kabupaten Sintang memiliki Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threatment*). Identifikasi masalah-masalah di lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang dianalisis dan dirumuskan atau dijelaskan secara ringkas masing-masing faktor sebagai berikut :

Kekuatan (*Strenghts*)

1. Adanya dukungan atasan
2. Adanya kerjasama antar bidang
3. Adanya program kerja tahunan
4. Adanya motivasi kerja
5. Adanya uraian tugas

Kelemahan (*Weakneses*)

1. Kurangnya tenaga fungsional
2. Kurangnya dukungan dana
3. Kurangnya sarana dan prasarana
4. Kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan



Peluang (*Opportunity*)

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan
2. Tersedianya pendidikan dan pelatihan
3. Adanya komitmen dan dukungan dari masyarakat
4. Adanya kerjasama dari instansi terkait
5. Adanya otonomi daerah

Ancaman (*Threatment*)

1. Kondisi geografis yang sulit
2. Bertambahnya objek pemeriksaan
3. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
4. Rendahnya supremasi hukum

3. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan Inspektorat mempunyai 9 (sembilan) permasalahan utama (*strategic issued*) yaitu :

c. Jumlah Obyek Pemeriksaan dan cakupan wilayah pengawasan yang luas.

Jumlah obyek pemeriksaan dengan cakupan wilayah pengawasan di Kabupaten Sintang dengan obyek pemeriksaan sebanyak 1012, dengan rincian sebagai berikut :

a) Sekretariat	: 2
b) Kecamatan	: 14
c) Kelurahan	: 16
d) Desa	: 391
e) Badan	: 7
f) Dinas	: 19
g) Satpol PP	: 1
h) BLUD RSUD	: 1
i) PUSKESMAS	: 20
j) SD	: 431
k) SMP	: 108
l) SKB	: 1
m) PDAM	: 1



d. Jumlah Tenaga Pemeriksa yang belum memadai.

Jumlah Tenaga Pemeriksa yang merupakan tenaga fungsional berjumlah 43 orang yang terdiri 34 orang Fungsional Auditor dan 9 orang Fungsional P2UPD.

Jika dibandingkan dengan jumlah Obyek pemeriksaan maka fungsi pengawasan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal dengan analisa sebagai berikut :

Jumlah pemeriksa minimal berjumlah 4 (empat) orang, maka dapat dibentuk maksimal 10 (sepuluh) tim pemeriksa. Untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap 1.012 (Seribu Dua Belas) obyek pemeriksaan setiap tim setidaknya harus melaksanakan 100 (seratus) kali pemeriksaan.

Jika 1 (satu) tim hanya dapat melaksanakan 1 (satu) kali pemeriksaan, maka setidaknya dalam 10 (sepuluh) tahun seluruh obyek pemeriksaan, baru dapat diperiksa.

e. Keterbatasan anggaran

Untuk melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) obyek pemeriksaan oleh 1 (satu) tim pemeriksa diperlukan biaya lebih kurang Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), maka diperlukan anggaran Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah). Pada Tahun Anggaran 2020 anggaran untuk pemeriksaan sebesar Rp 4.635.514.893,-.

f. Belum Optimalnya penghimpunan data dan informasi dalam rangka penyusunan Laporan Hasil Pengawasan.

g. Belum optimalnya koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap percepatan pemberantasan korupsi

h. Belum optimalnya mekanisme pengawasan

i. Belum Optimalnya Pemanfaatan Laporan Pengawasan

j. Lokasi obyek Pemeriksaan yang tersebar di wilayah Kabupaten Sintang.

k. Keterbatasan Sarana dan Prasarana



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017-2021

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Sintang tahun 2017-2021 merupakan suatu dokumen perencanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan program yang akan dicapai.

Rencana strategis juga berguna sebagai pedoman atau acuan bagi Inspektorat Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mendukung terlaksananya Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

1. VISI dan MISI, Tujuan dan Sasaran

a) VISI

Visi Kabupaten Sintang adalah, **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Pada Tahun 2021**". Rumusan visi di atas dapat dideskripsikan dari Visi Bupati dan Wakil Bupati.

b) MISI

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar visi yang telah ditentukan dapat tercapai dengan baik. Inspektorat Kabupaten Sintang sesuai dengan kewenangan yang diberikan serta tugas pokok dan fungsinya berkewajiban untuk mendorong pencapaian Misi Kabupaten, yaitu misi urusan ke 6 (enam) :

"Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih"



2. Analisis SWOT dan CSF

Berdasarkan analisis isu strategis Inspektorat Kabupaten Sintang pada Bab I di atas, Inspektorat Kabupaten Sintang memiliki Kekuatan (*Strenghts*) dan Kelemahan (*Weakneses*) dan secara eksternal Inspektorat Kabupaten Sintang memiliki Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threatment*). Identifikasi masalah-masalah di lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang dianalisis dan dirumuskan atau dijelaskan secara ringkas masing-masing faktor sebagai berikut :

Kekuatan (*Strenghts*)

1. Adanya dukungan atasan
2. Adanya kerjasama antar bidang
3. Adanya program kerja tahunan
4. Adanya motivasi kerja
5. Adanya uraian tugas

Kelemahan (*Weakness*)

1. Kurangnya tenaga fungsional
2. Kurangnya dukungan dana
3. Kurangnya sarana dan prasarana
4. Kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan

Peluang (*Opportunities*)

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan
2. Tersedianya pendidikan dan pelatihan
3. Adanya komitmen dan dukungan dari masyarakat
4. Adanya kerjasama dari instansi terkait
5. Adanya otonomi daerah

Ancaman (*Threatment*)

1. Kondisi geografis yang sulit
2. Bertambahnya objek pemeriksaan
3. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
4. Rendahnya supremasi hukum



Dari berbagai faktor di atas, maka dapat dirumuskan interaksi pencermatan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

INTERAKSI PENCERMATAN

PENCERMATAN LINGKUNGAN INTERNAL PENCERMATAN LINGKUNGAN EKSTERNAL	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
		1. Adanya dukungan atasan 2. Adanya kerjasama antar bidang 3. Adanya program kerja tahunan 4. Adanya motivasi kerja 5. Adanya uraian tugas
Peluang (O)	S + O (Pendorong)	W + O (Status Quo)
1. Tersedianya peraturan perundang-undangan 2. Tersedianya pendidikan dan pelatihan 3. Adanya komitmen dan dukungan dari masyarakat 4. Adanya kerjasama dari instansi terkait 5. Adanya otonomi daerah	1. Dengan adanya dukungan atasan untuk melaksanakan otonomi daerah 2. Melaksanakan PKPT berdasarkan peraturan dan perundang-undangan	1. Meningkatkan SDM yang profesional untuk melaksanakan otonomi daerah 2. Menyiapkan kinerja pengawasan sesuai peraturan dan perundang-undangan
Ancaman (T)	S + T (Status Quo)	W + T (Penghambat)
1. Kondisi geografis yang sulit 2. Bertambahnya objek pemeriksaan 3. Rendahnya penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 4. Rendahnya supremasi hukum	1. Dengan adanya dukungan atasan untuk menegakkan supremasi hukum 2. Melaksanakan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1. Menyiapkan SDM yang professional untuk menegakkan supremasi hukum 2. Meningkatkan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan



3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Inspektorat Kabupaten Sintang yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, kewenangan dan faktor-faktor kunci keberhasilan adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan Kapabilitas Tata Kelola APIP, melalui *Internal Audit Capability Model (IACM)*;
- (2) Peningkatan Kualitas pengawasan dan Tindak Lanjut hasil Pengawasan;
- (3) Meningkatkan Implementasi Aksi Pencegahan Korupsi.

Adapun sasaran Inspektorat Kabupaten Sintang yang ingin dicapai adalah :

- (1) Tujuan 1 : Meningkatkan Kapabilitas Tata Kelola APIP, melalui *Internal Audit Capability Model (IACM)*.

- | | |
|-------------|---|
| Sasaran 1.1 | Meningkatnya Profesionalisme dan Kapasitas Aparat Pengawasan. |
| Sasaran 1.2 | Meningkatnya Jumlah Regulasi/Kebijakan pengawasan yang diterbitkan. |

- (2) Tujuan 2 : Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

- | | |
|-------------|--|
| Sasaran 2.1 | Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan. |
| Sasaran 2.2 | Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengawasan Berkala. |
| Sasaran 2.3 | Meningkatnya penyelesaian jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan. |
| Sasaran 2.4 | Meningkatnya Hasil Evaluasi SAKIP SKPD. |



(3) Tujuan 3 :Meningkatkan Implementasi Aksi Pencegahan Korupsi

Sasaran 3.1 Meningkatkan SKPD yang Bebas Korupsi.

4. Strategi Sasaran

Dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran, Inspektorat melakukan strategi-strategi sebagai berikut:

Strategi Sasaran 1.1 adalah:

- Peningkatan Aparatur Pengawasan yang mengikuti diklat penjenjangan dan lulus diklat.

Strategi Sasaran1.2 adalah:

- Meningkatkan produk hukum tata kelola pengawasan.

*Strategi sasaran 2.1*adalah:

- Pemetaan dan prioritas penyelesaian tindaklanjut temuan pemeriksaan.

*Strategi sasaran 2.2*adalah:

- Pemetaan jumlah obrik dan penentuan prioritas pengawasan.

Strategi sasaran 2.3 adalah:

- Penyelesaian jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan.

Strategi sasaran 2.4 adalah:

- Pembinaan dan meningkatkan jumlah SKPD yang dievaluasi.

Strategi Sasaran 3.1 adalah :

- Pemetaan peranan SPIP pada SKPD.
- Meningkatkan Peranan WASKAT pada SKPD.
- Pemetaan SKPD pelayanan yang berpotensi menjadi Wilayah Bebas Korupsi.
- Peningkatan ketaatan LHKPN.



5. Kebijakan Sasaran

Arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Sintang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan terdiri dari:

- Kebijakan Sasaran 1.1 adalah :
 - Pengusulan penambahan formasi pejabat pengawas.
 - Pengiriman Aparatur Pengawasan mengikuti diklat penjenjangan.
 - Pengiriman Aparatur Pengawasan untuk mengikuti diklat substantif.
- Kebijakan atas Sasaran 1.2 adalah
 - Penyusunan regulasi/kebijakan pengawasan.
- Kebijakan atas Sasaran 2.1 adalah :
 - Menyelenggarakan gelar pengawasan dan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan.
 - Menyelenggarakan Sidang Majelis TP-TGR.
 - Penyempurnaan Sistem Informasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
- Kebijakan atas strategi sasaran 2.2 adalah:
 - Melakukan pengawasan berkala/regular, reuiu, evaluasi temuan pengawasan dan monitoring sesuai standar audit dan kode etik pejabat pengawas.
- Kebijakan atas sasaran 2.3 adalah:
 - Melakukan pemeriksaan kasus/khusus berdasarkan skala prioritas.
- Kebijakan atas sasaran 2.4 adalah:
 - Melakukan Pembinaan dan evaluasi kinerja SKPD.
- Kebijakan atas Sasaran 3.1 adalah:
 - Melakukan Sosialisasi dan Kebijakan pelaksanaan SPIP.
 - Bimtek Instrumen unsur/sub unsur SPIP.
 - Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPIP.



- Koordinasi dan konsultasi penerapan SPIP.
- Meningkatkan sosialisasi WASKAT.
- Monitoring/evaluasi penerapan WASKAT.
- Koordinasi dan Konsultasi WASKAT.
- Membuat peta reformasi birokrasi.
- Melakukan usulan penetapan SKPD berpredikat Wilayah Bebas Korupsi.
- Meningkatkan predikat SKPD WBK menjadi WBBM.
- Monitoring/Evaluasi SKPD WBK/WBBM.
- Monitoring/evaluasi wajib LHKPN.
- Menetapkan Wajib LHKPN.
- Sosialisasi dan BIMTEK Pengisian LHKPN.

6. Program

Adapun program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sintang tahun 2017 – 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- e. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
- f. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan; dan
- g. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;



B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian kinerja atau kontrak kinerja adalah janji untuk melaksanakan amanat pencapaian kinerja yang harus dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja tersebut dituangkan dalam Dokumen Penetapan/Perjanjian Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dokumen penetapan/perjanjian kinerja sebagai dokumen perjanjian kinerja diturunkan dari Renstra dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), melalui proses penganggaran. Ditingkat OPD dokumen perjanjian kinerja dibuat oleh Kepala OPD, yang berjanji dari Kepala OPD kepada Bupati untuk mencapai sasaran strategis dan target indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMD).

1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Rumusan Indikator	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
Sasaran 1 Meningkatnya Profesionalisme dan kapasitas Aparat Pengawas				
1.	Jumlah Aparat Pengawas (Pejabat Fungsional)	Jumlah Aparat Pengawas (Pejabat Fungsional)	Orang	Output
2.	Jumlah Aparat Pengawas yang mengikuti diklat teknis dan kapabilitas sumber daya Aparatur Pengawasan	Jumlah Aparat yang mengikuti diklat	Orang	Output
Sasaran 2 Meningkatnya Jumlah Regulasi/Kebijakan Pengawasan Yang Diterbitkan				
1.	Jumlah Regulasi/Kebijakan Pengawasan	Jumlah Regulasi/Kebijakan Pengawasan yang diterbitkan	Regulasi	Output
Sasaran 3 Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan				
1.	Prosentase Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	Persentase	Outcome
2.	Prosentase Kerugian	Jumlah Kerugian	Persentase	Output



	Daerah yang selesai ditindaklanjuti	Daerah yang selesai ditindaklanjuti		
3.	Jumlah inventarisasi Penetapan TP-TGR (Sidang TP-TGR)	Jumlah inventarisasi Penetapan TP-TGR (Sidang TP-TGR) yang dilaksanakan	Kegiatan	Output
4.	Peningkatan Sistem Informasi Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Jumlah Sistem Informasi Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang dipelihara	Aplikasi	Output
Sasaran 4 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pengawasan Berkala				
1.	Jumlah Objek pemeriksaan berkala yang diperiksa	Jumlah Objek pemeriksaan berkala yang diperiksa	Obrik	Output
Sasaran 5 Meningkatnya Penyelesaian Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti Dengan Pemeriksaan				
1.	Prosentase kasus/khusus yang diperiksa	Jumlah kasus/khusus yang diperiksa	Persentase	Outcome
Sasaran 6 Meningkatnya Hasil Evaluasi SAKIP SKPD				
1.	Jumlah SKPD yang dievaluasi	Jumlah SKPD yang dievaluasi	Persentase	Outcome
2.	Jumlah SKPD dengan nilai SAKIP kategori Baik	Jumlah SAKIP SKPD berkategori Baik	SKPD	Output
Sasaran 7 Meningkatnya SKPD Yang Bebas Korupsi				
1.	Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP	Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP	SKPD	Output
2.	Jumlah SKPD yang menerapkan WASKAT	Jumlah SKPD yang menerapkan WASKAT	SKPD	Output
3.	Jumlah SKPD yang diusulkan sebagai Zona Integritas atau berstatus WBK/WBBM	Jumlah SKPD berstatus WBK/WBBM	SKPD	Output
4.	Prosentase pejabat yang telah menyampaikan LHKPN	Pejabat yang telah menyampaikan LHKPN	Persentase	Output

2. Perjanjian kinerja

Sasaran-sasaran dalam perjanjian kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen perjanjian Kinerja adalah sebanyak 7 sasaran strategis yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sintang.



Masing-masing sasaran yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Sintang tahun 2020 selengkapnya dituangkan dalam formulir Perjanjian Kinerja di bawah ini:

No	Indikator Kinerja Utama	Rumusan Indikator	Target	Satuan	Keterangan
1	2	3		5	6
Sasaran 1 Meningkatnya Profesionalisme dan kapasitas Aparat Pengawas					
1.	Jumlah Aparat Pengawas (Pejabat Fungsional)	Jumlah Aparat Pengawas (Pejabat Fungsional)	52	Orang	Output
2.	Jumlah Aparat yang mengikuti diklat teknis dan kapabilitas sumber daya Aparatur Pengawasan	Jumlah Aparat yang mengikuti diklat	63 JFA 14 Non JFA	Orang	Output
Sasaran 2 Meningkatnya Jumlah Regulasi/Kebijakan Pengawasan Yang Diterbitkan					
1.	Jumlah Regulasi/Kebijakan Pengawasan	Jumlah Regulasi/Kebijakan Pengawasan yang diterbitkan	2	Regulasi	Output
Sasaran 3 Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan					
1.	Prosentase Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	90%	Persentase	Outcome
2.	Prosentase Kerugian Daerah yang selesai ditindaklanjuti	Jumlah Kerugian Daerah yang selesai ditindaklanjuti	50%	Persentase	Output
3.	Jumlah inventarisasi Penetapan TP-TGR (Sidang TP-TGR)	Jumlah inventarisasi Penetapan TP-TGR (Sidang TP-TGR) yang dilaksanakan	1	Kegiatan	Output
4.	Peningkatan Sistem Informasi Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Jumlah Sistem Informasi Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang dipelihara	1	Aplikasi	Output
Sasaran 4 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pengawasan Berkala					
1.	Jumlah pemeriksaan berkala yang diperiksa	Jumlah objek pemeriksaan berkala yang diperiksa	130	Objek	Output



Sasaran 5 Meningkatnya Penyelesaian Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti Dengan Pemeriksaan					
1.	Prosentase kasus/khusus yang diperiksa	Jumlah kasus/khusus yang diperiksa	80%	Persentase	Outcome
Sasaran 6 Meningkatnya Hasil Evaluasi SAKIP SKPD					
1.	Jumlah SKPD yang dievaluasi	Jumlah SKPD yang dievaluasi	100%	Persentase	Outcome
2.	Jumlah SKPD dengan nilai SAKIP kategori Baik	Jumlah SAKIP SKPD berkategori Baik	35	SKPD	Output
Sasaran 7 Meningkatnya SKPD Yang Bebas Korupsi					
1.	Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP	Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP	43	SKPD	Output
2.	Jumlah SKPD yang menerapkan WASKAT	Jumlah SKPD yang menerapkan WASKAT	43	SKPD	Output
3.	Jumlah SKPD yang diusulkan sebagai Zona Integritas atau berstatus WBK/WBBM	Jumlah SKPD berstatus WBK/WBBM	4	SKPD	Output
4.	Prosentase pejabat yang telah menyampaikan LHKPN	Pejabat yang telah menyampaikan LHKPN	90%	Persentase	Output

3. Program dan Kegiatan

Program Kegiatan Inspektorat Kabupaten Sintang sebagai penjabaran dari Sasaran Strategis pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	<ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan jasa surat menyurat.2. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.4. Penyediaan jasa kebersihan kantor.5. Penyediaan ATK.6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.9. Penyediaan makanan dan minuman.10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah11. Rapat Koordinasi dan Pembinaan Ke Dalam Daerah



		12. Penyediaan Tenaga Kontrak 13. Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1. Pengadaan perangkat komputer dan printer. 2. Pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor. 5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 6. Pemeliharaan rutin Perangkat Komputer dan Printer. 7. Penataan halaman kantor
3	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1. Penilaian Angka Kredit
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran. 3. Penyusunan rencana kerja perangkat daerah. 4. Penyusunan program kerja pengawasan. 5. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
5	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1. Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah 2. Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya 3. Inventarisasi temuan pengawasan 4. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 5. Audit alokasi dana desa 6. Reviu laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah 7. Evaluasi SAKIP 8. Pemeliharaan program SIM-HP 9. Inventarisasi penetapan TPTGR 10. Review RKA SKPD 11. Pencanaan zona integritas 12. Sapu bersih pungutan liar 13. Penilaian mandiri reformasi birokrasi 14. Laporan LHKPN/LHKASN 15. Pelaksanaan pengawasan internal berkala pada Dinas dan LTD 16. Layanan aspirasi pengaduan online rakyat sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N) 17. Monitoring tindak lanjut pengawasan 18. Pengawasan dana bantuan operasional sekolah (BOS) 19. Pengawasan dana alokasi khusus (DAK) 20. Review Penyerapan Anggaran 21. Reviu RPJMD dan Reviu RKPD 22. Assesor Penyusunan LAKIP 23. Pengawasan Dalam Rangka Penanganan Bencana



6	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.	<ol style="list-style-type: none">1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.2. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.3. Pelaksanaan Penguatan Kapabilitas APIP
7	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.2. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Pengawasan Semesteran dan Tahunan



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pengukuran Kinerja

a. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus

$$\text{CapaianIndikatorKinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus

$$\text{CapaianIndikatorKinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{CapaianIndikatorKinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.



Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang digunakan.

Untuk pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcome yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan

Nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Range	Penilaian
85 s.d 100	Sangat Berhasil
$70 \leq x < 85$	Berhasil
$55 \leq x < 70$	Cukup Berhasil
< 55	Tidak Berhasil

Sedangkan penyimpulan pada tingkat sasaran yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu menggunakan "Metode Rata-rata Tertimbang Data Kelompok". Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu:

Nilai Tengah	Penilaian
92,5%	Sangat Berhasil
77,5%	Berhasil
62.5%	Cukup Berhasil
27.5%	Tidak Berhasil

Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut yaitu rata-rata dari Hasil Perkalian jumlah indikator pada kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut.



$$\text{Rumus} = \frac{(\text{Jumlah Nilai Kelompok Kategori} \times \text{Mean Kategorinya})}{\text{Jumlah Indikator}} \times 100\%$$

b. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil Pengukuran Kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam Renstra. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil (*Outcome*).

Pengukuran Kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir pengukuran kinerja (PK).

Indikator Input adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator Input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah yaitu besaran dana yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan dan penggunaan SDM.

Indikator output yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan, seperti jumlah laporan hasil bimbingan teknis, LKjIP, Laporan Keuangan, Laporan Hasil Evaluasi, Audit yang diterbitkan dan sebagainya.

Indikator Outcome adalah indikator yang menggambarkan berfungsinya suatu output, antara lain prosentase peningkatan jumlah temuan yang ditindaklanjuti atau prosentase meningkatnya pelayanan pengaduan dari masyarakat.



Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran Inspektorat Kabupaten Sintang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Tingkat Capaian Sasaran			
		SB	B	CB	TB
1	Meningkatnya Profesionalisme dan kapasitas Aparat Pengawas.		83,55		
2	Meningkatnya Jumlah Regulasi/kebijakan pengawasan yang diterbitkan.	250			
3	Meningkatnya Penyelesaian Tindak lanjut Temuan hasil pemeriksaan.			67,22	
4	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawasan berkala.	210			
5	Meningkatnya penyelesaian jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.			60,1	
6	Meningkatnya Hasil evaluasi SAKIP SKPD.				47,37
7	Meningkatkan SKPD yang bebas Korupsi.				51,75

Dari 7 sasaran yang ada, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Sangat berhasil	2	Sasaran	(28,57%)
- Berhasil	1	Sasaran	(14,29%)
- Cukup Berhasil	2	Sasaran	(28,57%)
- Tidak Berhasil	<u>2</u>	<u>Sasaran</u>	<u>(28,57%)</u>
Jumlah	7	Sasaran	(100%)

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada bagian evaluasi kinerja berikut ini :



2. Evaluasi Kinerja dan Analisis Kinerja

Sasaran 1. Meningkatnya Profesionalisme dan Kapasitas Aparat Pengawas

Untuk mewujudkan sasaran tersebut di atas dianggarkan dana pendukung yang bersumber dari APBD tahun 2020 sebesar Rp. **1.120.099.200,00** (anggaran murni) dan setelah perubahan mengalami pengurangan anggaran menjadi sebesar **Rp. 363.922.841,00** telah terealisasi senilai Rp. **332.741.434,00** atau **91,43%** dari pagu Anggaran. Adapun rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah:

Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	6.800.000	7.800.000	7.351.000	94,24
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139.500.000	141.520.000	113.539.293,10	80,23
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan	16.990.000	13.120.000	11.018.300	83,98
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.614.755	4.614.755	4.604.755	99,78
	Penyediaan ATK	50.378.725	88.665.025	88.665.025	100
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	225.560.000	0	0	0
	Penilaian angka kredit jabatan fungsional auditor	30.941.500	33.241.500	33.241.500	100
Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	181.250.000	27.902.868	27.727.868	99,37
	Pelatihan teknis pengawasan	381.430.000	30.178.793	30.178.793	100



	dan penilaian akuntabilitas kinerja				
	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengawasan	66.754.320	0	0	0
	Pelaksanaan penguatan kapabilitas APIP	16.879.900	16.879.900	16.414.900	97,25
	Total	1.120.099.200	363.922.841	332.741.434	91,43 %

Dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2019, maka terjadi peningkatan atau penurunan pada beberapa kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Realisasi	
					2019 (%)	2020 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Kapabilitas Tata Kelola APIP	Meningkatnya Profesionalisme dan Kapasitas Aparat Pengawas	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	86	94,24
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86	80,23
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan	100	83,98
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100	99,78
				Penyediaan ATK	100	100
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	100	0
				Penilaian angka kredit jabatan fungsional auditor	95	100
			Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	98	99,37
				Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	95	100
				Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengawasan	96	0
	Pelaksanaan penguatan kapabilitas APIP	100	97,25			



Kinerja Sasaran "Meningkatnya Profesionalisme dan kapasitas Aparat Pengawas" dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	Jumlah Aparat Pengawas (Pejabat Fungsional)	Orang	52	43	82,69	Output
2	Jumlah Aparat Pengawas yang mengikuti diklat teknis dan kapabilitas sumber daya Aparatur Pengawasan	Orang	63 JFA 14 Non JFA	65 JFA	84,41	Output
Capaian Sasaran					83,55	

Sedangkan Perbandingan Indikator Kinerja Outcome tahun 2020 dengan 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			+/-	%
			2018	2019	2020		
1.	Jumlah Aparat Pengawas (Pejabat Fungsional)	Orang	44	45	43	-2	95,5%
2.	Jumlah Aparat Pengawas yang mengikuti diklat teknis dan kapabilitas sumber daya Aparatur Pengawasan	Orang	68	106	65	-41	61,32

Dilihat dari capaian indikator sasaran Outcome yang terdiri dari 2 (Dua) indikator di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan **Berhasil (83,55%)**.



Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

1) Jumlah Aparat Pengawas (Pejabat Fungsional)

Capaian Kinerja sebesar 82,69 yaitu Indikator Kinerja berupa Jumlah Aparat Pengawas (Pejabat Fungsional) diperoleh dari Jumlah Pejabat Pengawas di lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang. Indikator prosentase jumlah aparat pengawas adalah indikator yang dimaksudkan untuk mengukur jumlah atau banyaknya aparat pengawas yang ada di Inspektorat Kabupaten Sintang.

Pada tahun 2020 tidak terdapat penambahan jumlah aparat pengawas fungsional dari formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang terdapat penambahan jumlah aparat pengawas, maka di tahun 2020 justru terdapat pengurangan jumlah aparat pengawas fungsional, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Adanya perpindahan 4 (empat) pejabat fungsional ke jabatan struktural;
- Adanya 3 (tiga) orang pejabat fungsional yang memasuki masa purna tugas.

Apabila dibandingkan dengan target Renstra sebanyak 52 orang, sedangkan capaian pada tahun 2020 sebanyak 43 orang, maka jumlah aparat pengawas tahun 2020 belum memenuhi target.

2) Jumlah Aparat Pengawas yang mengikuti diklat teknis dan kapabilitas sumber daya Aparatur Pengawasan

Prosentase Jumlah Aparat Pengawas yang mengikuti diklat teknis dan kapabilitas sumber daya Aparatur Pengawasan mencapai 84,41 %. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Jumlah aparat pengawas fungsional yang mengikuti diklat secara tatap muka sebanyak 4 (empat) orang, yang meliputi diklat teknis Probitry Audit sebanyak 3 (tiga) orang FPA dan diklat penjenjangan Madya diikuti oleh 1 (satu) orang PFP2UPD.



- Sedangkan aparat pengawas fungsional yang mengikuti diklat secara daring melalui kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga diklat, sebanyak 61 (enam puluh satu) orang.

Apabila dibandingkan dengan target Renstra sebanyak 63 PFTT dan 14 Fungsional Umum, maka kondisi ini belum memenuhi target.

Hal ini disebabkan karena adanya bencana nasional berupa pandemi COVID~19, maka anggaran Inspektorat Kabupaten Sintang tahun 2020 mengalami 3 (tiga) kali perubahan (rasionalisasi/refocussing), dengan uraian sebagai berikut (Belanja Langsung) :

- Sebelum rasionalisasi sebesar Rp. 7.220.798.870,-
- Setelah Rasionalisasi tahap pertama menjadi sebesar Rp. 7.006.120.870,-
- Setelah Rasionalisasi tahap kedua menjadi sebesar Rp. 3.695.174.593,-
- Setelah Rasionalisasi tahap ketiga menjadi sebesar 4.458.424.893,-

Khusus untuk anggaran pendidikan dan pelatihan, mengalami rasionalisasi/refocusing tahap pertama dengan rincian sebagai berikut :

- Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal sebesar Rp. 225.560.000,00;
- Kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan sebesar Rp. 153.347.132,00;
- Kegiatan pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja sebesar Rp. 351.251.207,00;
- Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengawasan sebesar Rp. 66.754.320,00

Alternatif Solusi yang Dilakukan

Sehubungan wabah *Corona Virus Disease (COVID~19)* yang berakibat pada pengurangan anggaran, pelarangan terhadap beberapa kegiatan, diantaranya adalah perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten atau provinsi, maka untuk menyikapi hal tersebut, khususnya dalam hal peningkatan kompetensi, seluruh aparatur pengawasan diminta agar proaktif mengikuti webinar melalui aplikasi zoom meeting atau sejenisnya, yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga, baik lembaga pemerintah maupun swasta.



Hal ini selain untuk meningkatkan kemampuan teknis pengawasan, juga untuk pemenuhan angka kredit bagi pejabat fungsional tersebut.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Daya

- Efisiensi penggunaan sumber daya dapat diterjemahkan sebagai suatu kondisi dimana capaian kegiatan melebihi target, dengan penggunaan anggaran yang tidak mengalami penambahan;
- Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk sasaran strategis “Meningkatnya Profesionalisme dan Kapasitas Aparat Pengawas” tidak dapat diukur, karena terjadi pengurangan anggaran yang sangat signifikan dan berakibat pada hampir semua jenis kegiatan pendidikan dan pelatihan tidak dapat dilaksanakan.

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Profesionalisme dan Kapasitas Aparat Pengawas” adalah :

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal;
 - Kegiatan penilaian angka kredit jabatan fungsional auditor.
- Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
 - Kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
 - Kegiatan pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja;
 - Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengawasan;
 - Kegiatan pelaksanaan penguatan kapabilitas APIP.

Sedangkan program dan kegiatan penunjang atau secara tidak langsung mendukung pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Profesionalisme dan Kapasitas Aparat Pengawas” adalah :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat;



- Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan;
- Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor;
- Kegiatan penyediaan ATK.

Sasaran 2. Meningkatnya Jumlah Regulasi/Kebijakan Pengawasan Yang Diterbitkan

Untuk mewujudkan sasaran tersebut di atas dianggarkan dana pendukung yang bersumber dari APBD tahun 2020 sebesar **Rp. 505.249.952,00** yang telah terealisasi senilai **Rp. 500.618.080,00** atau **99,08 %** dari pagu Anggaran. Adapun rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah:

Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.211.590	58.591.752	58.591.752	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.091.200	4.839.200	4.839.200	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.780.000	6.780.000	5.760.000	84,96
	Penyediaan Makanan dan Minuman	33.561.600	45.448.000	45.404.300	99,90
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	525.420.000	221.255.000	221.214.776	99,98
	Pameran pembangunan	45.520.200	0	0	0
	Rapat-Rapat Koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	21.980.000	21.980.000	21.735.000	98,89
	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	19.500.000	1.828.500	1.825.264	99,82
	Jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran (tenaga kontrak)	143.390.400	126.890.400	123.610.688	97,42
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.840.700	3.840.700	3.840.700
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran		3.270.200	3.270.200	3.270.200	100
Penyusunan rencana kerja SKPD		3.154.200	3.154.200	3.154.200	100
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		3.154.200	3.154.200	3.154.200	100



Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	1.961.800	1.961.800	1.961.800	100
Sistem dan Prosedur Pengawasan	Penyusunan laporan pelaksanaan program pengawasan semesteran dan tahunan	2.256.000	2.256.000	2.256.000	100
TOTAL		858.092.090	505.249.952	500.618.080	99,08

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, maka pada tahun 2020 terdapat peningkatan dan penurunan pada beberapa kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Realisasi	
					2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola APIP	Meningkatnya Jumlah Reguler/Kebijakan Pengawasan yang Diterbitkan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	99,71	100
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	100
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	85	84,96
				Penyediaan Makanan dan Minuman	100	99,90
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	99	99,98
				Pameran pembangunan	100	0
				Rapat-Rapat Koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	97	98,89
				Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	0	99,82
				Jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran (tenaga kontrak)	93	97,42
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	100	
			Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	100	100	
			Penyusunan rencana kerja SKPD	100	100	
			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	100	100	



			Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	100	100
				Penyusunan laporan pelaksanaan program pengawasan semesteran dan tahunan	100	100

Kinerja Sasaran "Meningkatnya Jumlah Regulasi/Kebijakan Pengawasan yang Diterbitkan" dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Jumlah Regulasi/Kebijakan Pengawasan	Regulasi	2	5	250	Output
Capaian sasaran					250	

Indikator kinerja jumlah regulasi/kebijakan pengawasan dapat mencapai realisasi sebesar 5 (lima) regulasi dari target sebesar 2 (dua) regulasi pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa, target regulasi pada tahun 2020 telah melampaui target Renstra.

Regulasi atau kebijakan sistem prosedur pengawasan yang berjumlah 5 (lima) dokumen tersebut yaitu:

- Peraturan Bupati Sintang Nomor : 53 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 53);
- Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 700/907/KEP-ITKAB/2020 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020;
- Surat Edaran Bupati Sintang Nomor: 700/1280/ITKAB/2020 Tentang Pendampingan dan Pengawasan Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran Serta Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;



- Surat Edaran Bupati Sintang Nomor: 700/2985/ITKAB/2020 Tentang Mekanisme Koordinasi dan Pemeriksaan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor: 700/284/ITKAB-III/2020 Tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Kabupaten Sintang.

Perbandingan capaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir yaitu 2018, 2019, dan 2020 adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			+/-	%
			2018	2019	2020		
1.	Jumlah Regulasi/Kebijakan Pengawasan	Regulasi	0	2	5	+3	250%

Realisasi capaian jumlah regulasi yang diterbitkan tahun 2020 meningkat menjadi 5 (lima) regulasi. Capaian kinerja tahun 2020 meningkat sebesar 250% dari capaian tahun 2019, sedangkan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018 maka peningkatan kinerja tahun 2020 sebesar 500%.

Dari capaian indikator kinerja tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut dikategorikan **sangat berhasil (250%)**

Capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Jumlah Regulasi/Kebijakan Pengawasan yang Diterbitkan" diukur dari jumlah regulasi atau kebijakan pengawasan yang diterbitkan dengan target tahun 2020 sebanyak 2 regulasi dan berhasil direalisasikan sebanyak 5 (lima) regulasi.

Salah satu dari regulasi yang diterbitkan yaitu Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor:700/907/KEP-ITKAB/2020 tentang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, namun dari Surat Keputusan Bupati tersebut belum dibuat Surat Keputusan terkait dengan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi sehingga belum bisa dilakukan Inventarisasi dan tuntutan ganti rugi kepada



tindak indikasi kerugian daerah. Dari permasalahan tersebut, maka alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah mengajukan usulan Surat Keputusan Bupati tentang pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi, Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi, dan Hukum Acara Sidang dengan tujuan untuk mempermudah tindak lanjut terhadap indikasi kerugian daerah.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Jumlah Regulasi/Kebijakan Pengawasan

Capaian kinerja sebesar 250% untuk indikator kinerja Jumlah regulasi/kebijakan pengawasan adalah capaian terhadap jumlah kebijakan pengawasan yang diterbitkan selama kurun waktu tahun 2020. Pada tabel di atas dapat dilihat, bahwa terdapat 5 (lima) regulasi atau kebijakan yang diterbitkan, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.

Keberhasilan tersebut antara lain disebabkan oleh adanya tuntutan untuk menerbitkan kebijakan/regulasi, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi aparatur pengawasan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang, dalam rangka menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Jumlah regulasi/kebijakan pengawasan dipengaruhi juga oleh adanya efisiensi penggunaan sumber daya. Dalam proses penyusunan regulasi/kebijakan pengawasan penggunaan sumber daya dapat diminimalisir sedemikian rupa dan penyelesaian sesuai target waktu yang telah ditetapkan

Analisis Program/Kegiatan Yang Mendukung Keberhasilan/ Kegagalan

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran strategis "Meningkatnya Jumlah Regulasi/Kebijakan Pengawasan yang Diterbitkan" adalah :



- Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
 - Kegiatan penyusunan kebijakan system dan prosedur pengawasan;
 - Kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan program pengawasan semesteran dan tahunan.

Sedangkan program dan kegiatan penunjang yang secara tidak langsung mendukung pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Jumlah Regulasi/Kebijakan Pengawasan yang Diterbitkan” adalah :

- Program Administrasi Perkantoran
 - Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - Kegiatan penyediaan makanan dan minuman;
 - Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
 - Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah;
 - Kegiatan penyediaan bahan bakar minyak;
 - Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran;
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
 - Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran;
 - Kegiatan penyusunan rencana kerja SKPD;
 - Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;

Sasaran 3. Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan

Untuk mewujudkan sasaran tersebut di atas dianggarkan dana pendukung yang bersumber dari APBD tahun 2020 sebesar Rp. **350.575.600** yang telah



teralisasi senilai Rp.**347.734.600** atau 99,19 % dari pagu Anggaran. Adapun rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah:

Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Monitoring/ Pemantauan Tindak Lanjut	312.560.000	312.560.000	311.580.000	99,69
	Inventarisasi Temuan Pengawasan	259.871.680	27.460.000	26.473.000	96,41
	Pemeliharaan Program SIMHP	6.000.000	3.000.000	3.000.000	100
	Inventarisasi Penetapan TP-TGR	96.880.600	7.555.600	6.681.600	88,43
	TOTAL	675.312.200	350.575.600	347.734.600	99,19

Dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2019, maka pada tahun 2020 terdapat peningkatan dan penurunan pada beberapa kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Realisasi	
		2019 (%)	2020 (%)
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Monitoring/ Pemantauan Tindak Lanjut	99,88	99,69
	Inventarisasi Temuan Pengawasan	99,40	96,41
	Pemeliharaan Program SIMHP	100	100
	Inventarisasi Penetapan TP-TGR	0	88,43

Kinerja Sasaran "Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan" dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Prosentase Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	%	90	50,47	56,07	Outcome
2.	Prosentase Kerugian Daerah yang selesai ditindaklanjuti	%	50	56,42	112,84	Output



3.	Jumlah inventarisasi Penetapan TP-TGR (Sidang TP-TGR)	Kegiatan	1	0	0	Output
4.	Peningkatan Sistem Informasi Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Aplikasi	1	1	100	Output
Capaian sasaran					67,22 %	

Dilihat dari capaian indikator sasaran yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja outcome dan 3 (tiga) indikator output dapat dilihat sebagai berikut :

- 1) Prosentase Jumlah Temuan Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti sebesar 50,47% belum memenuhi target Renstra sebesar 90%
- 2) Prosentase Kerugian Daerah yang selesai ditindaklanjuti sebesar 56,42% telah memenuhi target Renstra sebesar 50%
- 3) Jumlah inventarisasi Penetapan TP-TGR (Sidang TP-TGR) dengan capaian 0 (nol) kegiatan belum memenuhi target Renstra sebesar 1 (satu) kegiatan.
- 4) Peningkatan Sistem Informasi Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan capaian 1 (satu) aplikasi sudah memenuhi target Renstra sebesar 1 (satu) aplikasi.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran outcome dapat dikategorikan **Cukup Berhasil (67,22%)**. Keberhasilan Inspektorat Kabupaten Sintang selama tahun 2020 dalam memberikan dan menjalankan sasaran ini sebagaimana ditunjukkan pada capaian indikator sasaran di atas secara ringkas diuraikan sebagai berikut:

1. Prosentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal

Capaian sebesar 50,47% merupakan perbandingan Jumlah Rekomendasi yang sudah tuntas ditindaklanjuti atas Laporan Pemeriksaan Eksternal maupun Internal sampai akhir tahun 2020 dibandingkan dengan Jumlah total rekomendasi hasil pemeriksaan internal maupun eksternal sampai akhir 2020. Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur peranan Inspektorat Kabupaten Sintang secara khusus dan Pemerintah Kabupaten Sintang secara



umum dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa eksternal dan internal.

Dari capaian kinerja sebesar 50,47% menyatakan hasil kegiatan Laporan Monitoring/pemantauan tindak lanjut, Laporan Inventarisasi TP-TGR dan Laporan Inventarisasi Temuan Pengawasan dilakukan analisa prosentase capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal/internal dengan rincian sebagai berikut:

- Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK 80,46% (dari Laporan BPK semester II tahun 2020)
- Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKP 75,00%
- Prosentase tindak lanjut hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi 100%
- Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaa ITJEN Kesehatan 80%
- Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sintang 42,03%

Sedangkan Perbandingan Indikator Kinerja Output terhadap tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			+/-	%
			2018	2019	2020		
1.	Jumlah Laporan Monitoring / Pemantauan Tindak Lanjut	LHM	35	42	49	+7	116
2.	Laporan Inventarisasi Penetapan TPTGR	LAP	5	0	0	0	0
3.	Laporan Inventarisasi Temuan Pengawasan	Keg.	6	6	6	+6	100
4.	SIMHP	Apk	1	1	1	+1	100



Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

- Kurangnya sarana prasarana pendukung pelaksanaan pengawasan.
- Lokasi Objek pemeriksaan tersebar di wilayah Kabupaten Sintang.
- Kurangnya kesadaran Objek Pemeriksaan untuk menindaklanjuti temuan-temuan hasil pemeriksaan.
- Belum optimalnya tindak lanjut penyelesaian kasus-kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Alternatif Solusi yang Dilakukan

- Mengadakan penambahan sarana dan prasarana pendukung guna menunjang kegiatan pemeriksaan.
- Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sesuai dengan skala prioritas.
- Menumbuhkan kesadaran obyek pemeriksaan bahwa setiap rekomendasi hasil pemeriksaan wajib ditindaklanjuti oleh obyek pemeriksaan dan Melakukan upaya untuk membantu obyek pemeriksaan untuk menyelesaikan temuan dengan mendorong, membimbing dan membuka diri bagi obrik yang ingin berkonsultasi dalam rangka upaya menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.
- Meningkatkan koordinasi antara anggota TP-TGR agar kasus-kasus pelanggaran yang penyelesaiannya direkomendasikan melalui jalur TP-TGR dapat segera ditindaklanjuti.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian kinerja 67,22% dengan katagori cukup berhasil untuk sasaran "Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan" antara lain dipengaruhi oleh penggunaan sumber daya yang sangat efektif. Hal ini disebabkan oleh adanya pengurangan anggaran dalam rangka penanganan Covid 19, sehingga berpengaruh terhadap seluruh pembiayaan kegiatan.



Analisis Program/Kegiatan Yang Mendukung Keberhasilan/ Kegagalan

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran strategis "Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan" adalah :

- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
 - Kegiatan monitoring/pemantauan tindak lanjut;
 - Kegiatan inventarisasi temuan pengawasan.

Sedangkan program dan kegiatan penunjang yang secara tidak langsung mendukung pencapaian sasaran strategis "Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan" adalah :

- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
 - Kegiatan pemeliharaan program SIM-HP;
 - Kegiatan inventarisasi penetapan TP-TGR.

Sasaran 4 : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pengawasan Berkala

a. Realisasi Program dan Kegiatan serta Anggaran Belanja

Untuk mencapai Sasaran ke- 4 (empat) maka Inspektorat Kabupaten Sintang menetapkan 2 (dua) program yang akan dilaksanakan, yaitu Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur dengan 8 (delapan) kegiatan dan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan 13 (tiga belas) kegiatan. Program dan Kegiatan tersebut didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBD Tahun 2020 sebesar **Rp.2.273.195.500,-** serta telah terealisasi senilai **Rp.2.090.926.496** atau **91,98%** dari pagu Anggaran, dimana anggaran tersebut telah dilakukan pemangkasan sebesar Rp.287.954.600,- yang dialokasikan untuk Kegiatan Percepatan Penanganan COVID-19. Adapun rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah:



Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Gedung Kantor	16.000.000	16.000.000	15.636.000	97,73
	Pembangunan Gedung Kantor	200.000.000	-	-	-
	Pengadaan Meubelair	44.205.000	-	-	-
	Pengadaan Perangkat Komputer Printer	206.040.000	383.130.000	206.040.000	53,78
	Penataan Halaman Kantor	100.000.000	150.000.000	149.890.000	99,95
	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	35.252.000	35.152.000	35.152.000	100
	Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Operasional	52.500.000	52.500.000	52.475.000	100
	Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12.500.000	12.500.000	12.500.000	100
	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100
	Pemeliharaan Rutin Perangkat Komputer Printer	23.250.000	23.250.000	23.250.000	100
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala pada kesekretariatan, kecamatan dan kelurahan	167.360.000	-	-	-
	Audit ADD	404.190.000	243.400.000	243.400.000	100
	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala pada dinas dan lembaga teknis daerah	357.020.000	282.350.000	282.335.000	100
	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	100.565.000	100.565.000	100.565.000	100
	Reviu Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	77.122.800	70.807.800	70.772.800	99,95
	Reviu Rencana Kerja & Anggaran	56.411.000	56.411.000	56.255.400	99,72
	Saber Pungli	131.211.300	8.795.000	8.795.000	100
	Probit Audit	35.595.700	-	-	-
	Penanganan Laporan Gratifikasi	48.093.400	-	-	-
	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	43.305.500	23.525.500	22.764.096	96,76



Pemeriksaan Pajak Pusat dan PNPB	75.970.000	-	-	-
Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan	4.126.700	4.126.700	4.126.700	100
Pengawasan Dana Alokasi Khusus	140.575.000	89.230.000	89.110.000	99,87
Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah	105.430.000	35.060.000	35.060.000	100
Reviu Daftar Rencana Kebutuhan Barang Daerah	38.595.700	-	-	-
Reviu RPJMD dan RKPD	44.241.000	69.241.000	66.671.000	96,29
Reviu Penyerapan Anggaran	40.390.000	12.875.000	12.875.000	100
Pengawasan Dalam Rangka Penanganan Bencana	-	603.076.500	602.053.500	99,83
JUMLAH	2.561.150.100	2.273.195.500	2.090.926.496	91,98

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, maka pada tahun 2020 terdapat peningkatan dan penurunan pada beberapa kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

Program	Kegiatan	2019 (%)	2020 (%)
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Gedung Kantor	100	97,73
	Pembangunan Gedung Kantor	-	-
	Pengadaan Meubelair	100	-
	Pengadaan Perangkat Komputer Printer	100	53,78
	Penataan Halaman Kantor	-	99,95
	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	100	100
	Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Operasional	98	100
	Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100	100
	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	100	100
	Pemeliharaan Rutin Perangkat Komputer Printer	100	100
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala pada kesekretariatan, kecamatan dan kelurahan	100	-
	Audit ADD	100	100
	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala pada dinas dan lembaga teknis daerah	100	100



Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	100	100
Reviu Laporan Keuangan & Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	93	99,95
Reviu Rencana Kerja & Anggaran	97	99,72
Saber Pungli	95	100
Probity Audit	99	-
Penanganan Laporan Gratifikasi	100	-
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	92	96,76
Pemeriksaan Pajak Pusat dan PNPB	-	-
Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan	100	100
Pengawasan Dana Alokasi Khusus	100	99,87
Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah	98	100
Reviu Daftar Rencana Kebutuhan Barang Daerah	98	-
Reviu RPJMD dan RKPD	99	96,29
Reviu Penyerapan Anggaran	-	100
Pengawasan Dalam Rangka Penanganan Bencana	-	99,83
JUMLAH		91,98

b. Realisasi Capaian Kinerja

Kinerja Sasaran "Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pengawasan Berkala" dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	Jumlah pemeriksaan objek berkala yang diperiksa	Objek	130	273	210	Output

Berdasarkan pengukuran yang dilakukan, kinerja yang dicapai sebesar 210%, dari target kinerja sebesar 130 (seratus tiga puluh) objek pemeriksaan direalisasikan sebesar 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) objek. Capaian kinerja tersebut merupakan pelaksanaan dari kegiatan pengawasan berkala, diantaranya :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Unit
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala pada kesekretariatan, kecamatan dan kelurahan	LHP	-	Bidwas I



2	Audit Alokasi Dana Desa	LHP	15	Bidwas I
3	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala pada dinas dan lembaga teknis daerah	LHP	10	Bidwas II
4	Pengawasan/Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK)	LHP	15	Bidwas II
5	Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	LHP	25	Bidwas II
6	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	LHE	6	Bidwas II
7	Pemeriksaan Pajak Pusat dan PNPB		-	Bidwas II
8	Reviu Rencana Kerja dan Anggaran	LHR	9	Bidwas III
9	Probit Audit	LHP	-	Bidwas III
10	Penanganan Laporan Gratifikasi	Lap	-	Bidwas III
11	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Lap	-	Bidwas III
12	Reviu Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	LHR	-	Bidwas III
13	Reviu RPJMD dan RKPD	LHR	2	Bidwas III
14	Reviu Penyerapan Anggaran	LHR	1	Bidwas III
15	Reviu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19	LHR	1	Bidwas III
16	Reviu RKA Refocussing dan Realokasi Anggaran Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19	LHR	43	Bidwas III
17	Monitoring dan Evaluasi BLT DD Penanganan Dampak COVID-19	LHM	141	Bidwas III
18	Audit DTT Terhadap Penangan COVID-19	LHP	1	Bidwas II
19	Reviu Analisa Standar Biaya dan HSPK	LHP	1	Bidwas III
20	Saber Pungli	Lap	-	Bidwas III
21	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	LHR	1	Bidwas IV
22	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	LHR	1	Bidwas IV
23	Penyusunan PKPT Berbasis Risiko	Lap	1	-
			273	

c. Perbandingan Capaian Kinerja

Perbandingan capaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2018, 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			+/-	%
			2018	2019	2020		
1	Jumlah Obyek Pemeriksaan Berkala yang diperiksa	Obrik	108	213	273	60	128,17

Capaian kinerja tahun 2020 meningkat sebesar 128,17% dari capaian tahun 2019, sedangkan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018 maka peningkatan kinerja tahun 2020 sebesar 252,78%.



Dari capaian indikator sasaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut dikategorikan **Sangat Berhasil (210%)**

d. Analisis Penyebab Keberhasilan Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian kinerja Sasaran **Meningkatnya Kuantitas Dan Kualitas Pengawasan Berkala** diukur melalui jumlah objek pemeriksaan berkala yang dilakukan pemeriksaan, dari target objek pemeriksaan yang ditetapkan tahun 2020 sebesar 130 (seratus tiga puluh) objek, Inspektorat Kabupaten Sintang mampu merealisasikan sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) objek pemeriksaan, atau sebesar 210%. Capaian ini mampu diwujudkan dalam kondisi banyaknya kegiatan pengawasan yang tidak dilaksanakan dikarenakan pemangkasan anggaran kegiatan sehingga mengurangi capaian target kinerja yang telah ditetapkan. Pemangkasan anggaran tersebut berakibat pada tidak terlaksananya 7 (tujuh) kegiatan pengawasan yaitu Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala pada kesekretariatan, kecamatan dan kelurahan, Probitiy Audit, Penanganan Laporan Gratifikasi, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Reviu Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Saber Pungli, dengan jumlah anggaran yang dipangkas sebesar Rp.609.819.800,-, Selain terhadap 7 (tujuh) kegiatan pengawasan tersebut, pemangkasan anggaran juga dilakukan terhadap sebagian anggaran kegiatan pengawasan, sehingga memberikan pengaruh berkurangnya target pengawasan yang telah direncanakan.

Tercapainya target kinerja disebabkan pengurangan jumlah kegiatan pengawasan tersebut juga dibarengi dengan penambahan 4 (empat) kegiatan pengawasan penanganan bencana yaitu Reviu *Refocussing* dan Realokasi Penanganan COVID-19, Reviu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penanganan COVID-19, Monitoring dan Evaluasi BLT DD Penanganan Dampak COVID-19 dan Audit DTT Terhadap Penangan COVID-19. Selain itu, terdapat pula kegiatan pengawasan yang dilakukan tanpa didukung anggaran.

Selain capaian secara kuantitas jumlah pengawasan berkala, hal penting yang harus mendapat perhatian adalah bagaimana meningkatkan kualitas pengawasan berkala. Upaya peningkatan kualitas akan berkaitan dengan Sasaran-sasaran lainnya,



diantaranya peningkatan profesionalisme dan kapasitas pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan teknis dan penjenjangan yang memenuhi unsur jumlah minimal jam diklat yang telah ditetapkan serta regulasi/kebijakan pengawasan yang mendukung terlaksananya pengawasan yang berkualitas. Unsur-unsur penting lain yang menentukan kualitas pengawasan antara lain :

- 1) Perencanaan Pengawasan yang terukur, relevan, dinamis serta mempertimbangkan risiko pada setiap objek pemeriksaan yang akan dilakukan. Perencanaan pengawasan yang berkualitas akan mempengaruhi kualitas pemeriksaan berkala, sehingga pemeriksaan yang dilakukan akan efektif;
- 2) Penetapan Standar Operasional Prosedur yang dijadikan acuan pelaksanaan pemeriksaan, dengan adanya Standar Operasional Prosedur maka akan menjaga setiap pemeriksaan/pengawasan pada taraf kualitas minimal yang diharapkan.

e. Permasalahan yang dihadapi

Berdasarkan analisis atas capaian kinerja, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan terkait peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan berkala yaitu :

- 1) Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-2/PK/2021, Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Dari surat edaran tersebut maka pada tahun 2021 akan dilakukan realokasi anggaran yang dapat berdampak pada pemotongan anggaran pengawasan, khususnya pada belanja kegiatan pengawasan Inspektorat Sintang TA 2021. Jika pemotongan anggaran tersebut tidak dialokasikan untuk kegiatan yang berkaitan pengawasan penanganan COVID-19, maka akan memberikan pengaruh terhadap kuantitas target pengawasan berkala;
- 2) Penambahan Kegiatan-kegiatan mandatori dari pusat yang dilimpahkan ke Inspektorat Kabupaten Sintang, namun tidak diimbangi dengan SDM dan anggaran yang memadai;



- 3) Pemangkasan anggaran pendidikan dan pelatihan APIP pada tahun 2020, memberikan dampak pada peningkatan kompetensi dan kualitas pemahaman APIP terhadap teknis pengawasan.

f. Alternatif Solusi yang Dilakukan

Dari pointer permasalahan di atas, maka alternatif solusi yang dapat dilakukan antara lain :

- 1) Merasionalisasi target kinerja sesuai dengan perkembangan kondisi;
- 2) Penerapan PKPT berbasis risiko dan pembagian penugasan dengan mempertimbangkan beban kerja, jumlah SDM dan kompetensi;
- 3) Penentuan pelaksanaan Pelatihan di Kantor Sendiri yang efektif dan efisien;
- 4) Menerapkan Standar Operasional Prosedur disetiap pelaksanaan pengawasan.

g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya/Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja di ukur melalui selisih persentase capaian kinerja 100% atau lebih dengan persentase realisasi belanja pendukung kinerja. Berdasarkan pengukuran yang dilakukan, maka tingkat efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pengawasan Berkala	Jumlah Objek Pemeriksaan Berkala yang Diperiksa	210	91,98	8,02

Terlihat bahwa sasaran Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pengawasan Berkala, menunjukkan pencapaian lebih dari 100%, yaitu telah mencapai kinerja sebanyak 210% namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 91.98% dari total anggaran yang dialokasikan. Sasaran yang berhasil dicapai dengan belanja dibawah 100% menunjukkan telah tercapainya efisiensi anggaran sebesar 8,02, Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan



dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

h. Analisis Program/Kegiatan yang Mendukung Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran strategis "Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pengawasan Berkala" adalah :

- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
 - Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala pada dinas dan lembaga teknis daerah;
 - Kegiatan audit ADD;
 - Kegiatan reviu LKPD;
 - Kegiatan reviu LKjIP;
 - Kegiatan reviu RKA;
 - Kegiatan Saber Pungli;
 - Kegiatan PMPRB;
 - Kegiatan penyusunan PKPT;
 - Kegiatan pengawasan DAK;
 - Kegiatan pengawasan dana BOS;
 - Kegiatan reviu DRKBMD;
 - Kegiatan reviu RPJMD dan RKPD;
 - Kegiatan reviu penyerapan anggaran;
 - Kegiatan pengawasan dalam rangka penanganan bencana.

Sedangkan program dan kegiatan penunjang yang secara tidak langsung mendukung pencapaian sasaran strategis "Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pengawasan Berkala" adalah :

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor;



- Kegiatan pengadaan perangkat komputer dan printer;
- Kegiatan penataan halaman kantor;
- Kegiatan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor;
- Kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional;
- Kegiatan pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor;
- Kegiatan pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor;
- Kegiatan pemeliharaan rutin perangkat komputer printer

Sasaran 5 Meningkatnya Penyelesaian Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti Dengan Pemeriksaan

Untuk mewujudkan sasaran tersebut di atas dianggarkan dana pendukung yang bersumber dari APBD tahun 2020 sebesar **Rp.1.106.034.000,00** (anggaran murni) dan setelah perubahan mengalami pengurangan anggaran menjadi sebesar **Rp. 580.112.000,00** yang telah terealisasi sebesar **Rp.577.081.000,00** atau **99,34%** dari pagu Anggaran. Adapun rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah sebagai berikut:

Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah	386,200,000	316,280,000	314,930,000	99.57 %
	Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan dibawahnya	73,773,800	95,903,800	94,673,800	98.72
	Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)	252,969,200	167,938,200	167,477,200	99.73
	Penanganan Aksi Benturan Kepentingan	312,531,000	-	-	0.00
	Koordinasi TP4D	80,560,000	-	-	0.00



	TOTAL	1,106,034,000	580,122,000	577,081,000	99.34
--	--------------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------

Dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2020, maka terjadi peningkatan atau penurunan pada beberapa kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Realisasi	
					2019 (%)	2020 (%)
1.	Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Tindak Lanjut Pengawasan	Meningkatnya Penyelesaian Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah	97.66	99.57
				Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan dibawahnya	89.67	98.72
				LAPOR!-SP4N	85.94	99.73
				Penanganan Aksi Benturan Kepentingan	-	-
				Koordinasi TP4D	-	-

Kinerja Sasaran "Meningkatnya Penyelesaian Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti Dengan Pemeriksaan" dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Prosentase kasus/khusus yang diperiksa	%	80	48,1	60,1	Outcome
Capaian sasaran					60,1	

Capaian sasaran sebesar **60,1 %** diperoleh dari prosentase perbandingan Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan atas penanganan pengaduan di lingkungan pemerintah daerah sebesar **10 LHA** yang terdiri dari **8 Laporan** Atas Pengaduan ke



Inspektorat Kabupaten Sintang dan **2 Laporan** Atas Permintaan Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap jumlah Pengaduan yang masuk sebesar **24 Pengaduan** ditambah dengan **3 Audit Khusus**.

Namun demikian apabila dibandingkan dengan jumlah target sebagaimana yang tercantum dalam target Renstra sebesar **80%** maka Prosentase Kasus/Khusus yang diperiksa belum mencapai target dengan persentase sebesar **60,1 %**.

Sedangkan Perbandingan Indikator Kinerja Output terhadap tahun 2020 dengan 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			+/-	%
			2018	2019	2020		
1.	Jumlah Laporan Pemeriksaan kasus pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	LHA	19	26	10	-16	38,46 %
2.	Jumlah Laporan Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintahan dibawahnya	LHA	1	1	3	+2	300 %

Realisasi LHA Pemeriksaan Kasus Pengaduan pada tahun 2020 menurun dengan jumlah 10 LHA dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni turun sebesar **38,46 %**.

Realisasi LHA Khusus melampaui target yang telah ditetapkan 1 LHA dan terealisasi sebanyak 3 LHA dimana terdapat 3 Kegiatan Audit yaitu Audit Khusus Penyertaan Modal PDAM TA. 2019 sesuai DPA, Audit Khusus Piutang Daerah dengan Anggaran Perubahan serta Audit Khusus Pengelolaan Keuangan pada Inspektorat tanpa Pembiayaan, dibandingkan dengan tahun sebelumnya naik sebesar **300%**.

Dilihat dari capaian indikator sasaran outcome yang terdiri dari 2 indikator di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut dapat dikategorikan **Cukup Berhasil (60,1%)**.



**Analisa Penyebab keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/
Penurunan Kinerja :**

- Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang bersifat insidentil yang dapat dilaksanakan apabila terdapat permintaan dari Pimpinan, Aparat Penegak Hukum (APH) dan Pengaduan dari Masyarakat yang secara tidak langsung berdampak pada rencana dan target yang sulit ditetapkan secara tepat.
- Masih terbatasnya jumlah penugasan dan pelatihan substantif terhadap Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) terhadap Audit Kasus Pengaduan Masyarakat.
- Sebagian Besar Obyek Kasus Pengaduan berada pada lokasi yang memiliki kondisi jarak tempuh yang jauh dan infrastruktur/akses jalan yang sulit dilalui serta kurangnya sarana dan prasarana mobilitas yang memadai.
- Masih terdapatnya 14 pengaduan sampai dengan bulan Desember 2020 yang belum ditindaklanjuti dengan audit.

Alternatif Solusi yang Dilakukan :

- Meningkatkan Kualitas Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) dengan memberikan Pendidikan dan pelatihan substantif yang memadai.
- Memberikan dukungan tambahan anggaran pada penanganan kasus, mengingat masih banyak pengaduan yang belum ditindaklanjuti.
- Mengadakan penambahan sarana dan prasarana pendukung guna menunjang kegiatan pemeriksaan.
- Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, sebagai usaha penyelesaian terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya/Anggaran

Sehubungan danya refocusing anggaran dalam rangka penanganan Covid 19, maka penggunaan sumber daya/anggaran untuk pencapaian sasaran "Meningkatnya Penyelesaian Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti Dengan Pemeriksaan" dapat disimpulkan sangat efektif.



Analisis Program/Kegiatan yang Mendukung Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran strategis "Meningkatnya Penyelesaian Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti Dengan Pemeriksaan" adalah :

- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
 - Kegiatan penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah;
 - Kegiatan penanganan kasus pada wilayah pemerintahan di bawahnya;
 - Kegiatan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPOR SP4N).

Sasaran 6 Meningkatnya Hasil Evaluasi SAKIP SKPD

Untuk mewujudkan sasaran tersebut di atas dianggarkan dana pendukung yang bersumber dari APBD tahun 2020 sebesar Rp. **360.800.000,00** yang telah terealisasi senilai Rp. **360.555.000,00** atau **99,93%** dari pagu Anggaran. Adapun rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah:

Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Evaluasi LAKIP	408.415.000	161.860.000	161.780.000	99,95
	Assesor LAKIP	275.093.200	198.940.000	198.775.000	99,92
TOTAL		683.508.200	360.800.000	360.555.000	99,93

Dibandingkan dengan realisasi Anggaran tahun 2019, maka terjadi peningkatan pada kegiatan Evaluasi LAKIP dan Assesor LAKIP, dengan rincian sebagai berikut:



No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Realisasi	
					2019 (%)	2020 (%)
1	2	3	4	5	6	7
	Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Tindak Lanjut Pengawasan	Meningkatnya Hasil Evaluasi SAKIP SKPD	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Evaluasi LAKIP	96,02	99,95
				Assesor LAKIP	-	99,92

Kinerja Sasaran "Meningkatnya Hasil Evaluasi SAKIP SKPD" dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Jumlah SKPD yang dievaluasi	SKPD	43	26	60,46%	Output
2.	Jumlah SKPD dengan nilai SAKIP kategori Baik	SKPD	35	12	34,28%	Output
Capaian sasaran					47,37%	

Dilihat dari capaian indikator sasaran Outcome yang terdiri dari 2 (Dua) indikator di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan **tidak berhasil** (47,37%).

Sedangkan Perbandingan Indikator Kinerja Output terhadap tahun 2020 dengan 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			+/-	%
			2018	2019	2020		
1.	Jumlah SKPD yang Dievaluasi	SKPD	34	43	26	-17	60,46
2.	Jumlah SKPD dengan nilai SAKIP Kategori Baik	SKPD	0	6	12	6	200

Berdasarkan persentase capaian kinerja dibandingkan dengan persentase penyerapan anggaran, maka tingkat efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja sebagai berikut ini:



No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Hasil Evaluasi SAKIP SKPD	Jumlah SKPD yang Dievaluasi	60,46	99,93	33,97 %
		Jumlah SKPD dengan nilai SAKIP Kategori Baik	34,28		

Dari tabel persentase capaian kinerja di atas pada tahun 2020 dapat dilihat bahwa sasaran Meningkatkan Hasil Evaluasi SAKIP OPD menunjukkan pencapaian kurang dari 100%, Jumlah SKPD yang Dievaluasi sebesar 60,46% dan Jumlah OPD dengan nilai SAKIP Kategori Baik sebesar 34,28%, dengan tingkat efisiensi sebesar 33,97%.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

1) Jumlah SKPD yang Dievaluasi

Jumlah SKPD yang dievaluasi pada tahun 2020 sebanyak 26 OPD, target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja antara Inspektur Kabupaten Sintang dengan Bupati Sintang tahun 2020 sebanyak 43 OPD sehingga capaian indikator kinerja sasaran sebesar 60,46%.

Pada tahun 2019, indikator kinerja sasaran berupa Jumlah SKPD yang dievaluasi sebanyak 43 OPD, sehingga apabila dibandingkan dengan jumlah OPD yang dievaluasi pada tahun 2020 maka realisasi indikator kinerja sasaran mengalami penurunan sebanyak 17 OPD.

Apabila dibandingkan dengan target Renstra sebanyak 43 OPD, sedangkan target yang akan dievaluasi pada tahun 2020 sebanyak 43 OPD, tetapi terealisasi sebanyak 26 OPD, maka jumlah OPD yang dievaluasi pada tahun 2020 belum memenuhi target. Hal ini disebabkan karena adanya bencana nasional berupa Pandemi COVID-19, maka anggaran Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun 2020 mengalami perubahan (*rasionalisasi/refocussing*) yaitu dari anggaran awal (sebelum rasionalisasi) sebesar Rp.408.415.000,00 menjadi sebesar Rp.161.860.000,00.



2) Jumlah SKPD dengan Nilai SAKIP Kategori Baik

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) adalah suatu sistem manajemen kinerja yang berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan dan sistem penganggaran, untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Salah satu sasaran dari Sistem AKIP yaitu menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien dan efektif serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dan kemajuan implementasi SAKIP serta memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja.

Evaluasi atas implementasi Sistem AKIP Tahun 2020 dilaksanakan pada 26 (dua puluh enam) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu :

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang;
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang;
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang;
4. Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang;
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang;
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang;
7. Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang;
8. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang;
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang;
11. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang;



12. Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang;
13. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang;
14. Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang;
15. Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang;
17. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang;
18. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang;
19. Kantor Camat Sintang Kabupaten Sintang;
20. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang;
21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang;
22. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang;
23. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang;
24. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang;
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang;
26. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja.

Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan instansi.

Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup :



- Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
- Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
- Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
- Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

Untuk keberhasilan pelaksanaan evaluasi, terlebih dahulu perlu didefinisikan kepentingan pihak-pihak pengguna informasi hasil evaluasi. Informasi yang dihasilkan dari suatu evaluasi yang dapat diakses antara lain mencakup :

1. Informasi untuk mengetahui tingkat kemajuan/perkembangan (progres);
2. Informasi untuk membantu agar kegiatan tetap berada dalam alurnya; dan
3. Informasi untuk meningkatkan efisiensi.

Pertimbangan utama dalam menentukan ruang lingkup evaluasi terhadap kebijakan, program, atau kegiatan pemerintah adalah kemudahan dalam pelaksanaan dan didukung oleh sumber daya yang tersedia. Pertimbangan ini merupakan konsekuensi logis karena adanya keterbatasan sumber daya.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah dengan predikat BB (Sangat Baik) yang berarti bahwa OPD tersebut akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal, 10 (sepuluh) OPD dengan predikat B (Baik) yang berarti bahwa tingkat Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan, 1 (satu) OPD dengan predikat CC (Cukup) yang berarti bahwa Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar, 6 (enam) OPD dengan predikat C (Kurang) yang berarti bahwa sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan mendasar, dan 7 (tujuh) OPD dengan predikat D (Sangat Kurang) yang



berarti bahwa sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja sehingga perlu perbaikan yang sangat mendasar.

Dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sintang terhadap 26 (dua puluh enam) OPD, diperoleh Nilai Hasil Evaluasi pada tabel sebagai berikut:

No	Nama OPD	Total Nilai	Kategori	Keterangan
1.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang	78,54	BB	Sangat Baik
2.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang	63,87	B	Baik
3.	Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang	66,40	B	Baik
4.	Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang	61,28	B	Baik
5.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang	70,55	BB	Sangat Baik
6.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang	62,51	B	Baik
7.	Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang	31,33	C	Kurang
8.	Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang	40,72	C	Kurang
9.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang	61,92	B	Baik
10.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang	57,47	CC	Cukup
11.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang	37,84	C	Kurang
12.	Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang	26,34	D	Sangat Kurang



13.	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang	48,43	C	Kurang
14.	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang	65,06	B	Baik
15.	Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang	64,92	B	Baik
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang	31,86	C	Kurang
17.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang	19,86	D	Sangat Kurang
18.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang	66,05	B	Baik
19.	Kantor Camat Sintang Kabupaten Sintang	29,03	D	Sangat Kurang
20.	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang	27,88	D	Sangat Kurang
21.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang	30,67	C	Kurang
22.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang	69,40	B	Baik
23.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang	61,19	B	Baik
24.	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang	18,20	D	Sangat Kurang
25.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang	10,59	D	Sangat Kurang
26.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sintang	17,95	D	Sangat Kurang



dari penjelasan tersebut, capaian indikator kinerja sasaran Jumlah OPD dengan nilai SAKIP Kategori Baik sebanyak 12 OPD. Target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja antara Inspektur Kabupaten Sintang dengan Bupati Sintang tahun 2020 sebesar 35 OPD dengan target capaian 100%, sehingga capaian kinerja Inspektorat Kabupaten pada Indikator Kinerja Sasaran Jumlah OPD dengan nilai SAKIP Kategori Baik adalah 34,28%.

Pada tahun 2019, indikator kinerja sasaran berupa Jumlah OPD dengan nilai SAKIP Kategori Baik sebanyak 6 OPD, sehingga apabila dibandingkan dengan tahun 2020 maka realisasi indikator kinerja sasaran mengalami kenaikan sebanyak 6 OPD atau sebesar 100%.

Hambatan/Kendala dalam pencapaian target kinerja adalah :

1. Kompetensi SDM penyusun laporan kinerja di masing-masing OPD yang terbatas, baik secara kuantitas maupun kualitas. SDM penyusun laporan kinerja OPD bertumpu pada satu orang, kurang mendapat dukungan data dari pihak-pihak yang menangani kinerja pada masing-masing bidang. Selain itu, rotasi dan mutasi antar OPD yang tidak dapat dihindarkan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, terutama yang berhubungan dengan Personil SDM yang menangani penyusunan Laporan Kinerja OPD.
2. Kurangnya kesiapan OPD yang akan dievaluasi karena beberapa faktor Internal di OPD.
3. Keterbatasan waktu yang diberikan kepada Inspektorat Kabupaten Sintang untuk kegiatan evaluasi laporan kinerja OPD, sehingga berakibat pada kurang maksimalnya hasil evaluasi.

Alternatif Solusi yang Dilakukan :

1. Berkaitan dengan kompetensi SDM penyusun laporan kinerja OPD, Pemerintah Kabupaten Sintang perlu memfasilitasi SDM penyusun laporan kinerja OPD untuk mengikuti bimtek/pelatihan/diklat terkait dengan penyusunan laporan kinerja OPD. Terkait dengan mutasi SDM penyusun Laporan Kinerja OPD meskipun tidak bisa dihindarkan, tetapi dampaknya



dapat diminimalisir dengan memberikan tukar informasi/sharing pengetahuan dengan SDM lainnya dalam satu OPD.

2. Meningkatkan kesiapan OPD sebelum dievaluasi oleh Inspektorat, sehingga data atas Laporan Kinerja yang disajikan merupakan data yang akurat.
3. Berkaitan dengan keterbatasan waktu yang diberikan kepada Inspektorat Kabupaten Sintang untuk kegiatan evaluasi laporan kinerja OPD, perlu dilakukan rapat koordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, serta dengan OPD yang akan dilakukan evaluasi untuk menyelesaikan penyusunan laporan kinerja OPD tepat waktu.

Sebelum pelaksanaan Evaluasi Laporan Kinerja OPD Inspektorat juga melakukan Assesment/pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja terhadap 41 OPD adalah sebagai berikut:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang
2. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang
4. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang
5. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang
7. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang
8. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang
9. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang
11. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang
12. Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang
13. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang
14. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang
15. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Sintang
16. Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang
17. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang



18. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang
19. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang
20. Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang
21. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang
22. Dinas Sosial Kabupaten Sintang
23. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang
24. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang
25. Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang
26. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang
27. RSUD Ade M. Djoen Kabupaten Sintang
28. Kantor Camat Sintang
29. Kantor Camat Kelay Permai
30. Kantor Camat Sungai Tebelian
31. Kantor Camat Tempunak
32. Kantor Camat Sepauk
33. Kantor Camat Dedai
34. Kantor Camat Binjai Hulu
35. Kantor Camat Kayan Hilir
36. Kantor Camat Kayan Hulu
37. Kantor Camat Ketungau Hilir
38. Kantor Camat Ketungau Tengah
39. Kantor Camat Ketungau Hulu
40. Kantor Camat Serawai
41. Kantor Camat Ambalau

pelaksanaan pendampingan dalam penyusunan LKjIP tahun 2019 terhadap 41 OPD terdapat 16 OPD yang sudah lengkap dokumennya (Renstra, IKU, RKT, PK, RA, LKjIP). Target yang dicapai dalam pelaksanaan Assesment sebesar 100% dari target OPD yang ditentukan. Namun dalam pemenuhan dokumen terdapat 39,02% dari 41 OPD yang diAssesment.



Hambatan/Kendala dalam Pelaksanaan Assesment adalah :

1. Kompetensi SDM penyusun laporan kinerja di masing-masing OPD yang terbatas, baik secara kuantitas maupun kualitas. SDM penyusun laporan kinerja OPD bertumpu pada satu orang, kurang mendapat dukungan data dari pihak-pihak yang menangani kinerja pada masing-masing bidang. Selain itu, rotasi dan mutasi antar OPD yang tidak dapat dihindarkan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, terutama yang berhubungan dengan Personil SDM yang menangani penyusunan Laporan Kinerja OPD.
2. Kurangnya kesiapan OPD yang akan di Assesment karena beberapa faktor Internal di OPD antara lain data yang belum lengkap terkait penyusunan LKjIP dan dokumen pendukung lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, strategi yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Sintang untuk mengatasi hambatan dan tantangan tersebut diantaranya:

1. Berkaitan dengan kompetensi SDM penyusun laporan kinerja OPD, Pemerintah Kabupaten Sintang perlu memfasilitasi SDM penyusun laporan kinerja OPD untuk mengikuti bimtek/pelatihan/diklat terkait dengan penyusunan laporan kinerja OPD. Terkait dengan mutasi SDM penyusun Laporan Kinerja OPD meskipun tidak bisa dihindarkan, tetapi dampaknya dapat diminimalisir dengan memberikan tukar informasi/sharing pengetahuan dengan SDM lainnya dalam satu OPD.
2. Meningkatkan kesiapan OPD sebelum dievaluasi oleh Inspektorat, agar dapat di Assesment/pendampingan dalam penyusunan LKjIP dan dokumen pendukung lainnya sehingga data atas Laporan Kinerja yang disajikan merupakan data yang akurat.
3. Berkaitan dengan keterbatasan waktu yang diberikan kepada Inspektorat Kabupaten Sintang untuk kegiatan Assesment Penyusunan LKjIP dan Dokumen Lainnya terhadap OPD, perlu dilakukan rapat koordinasi dengan Bagian Organisasi dan Tata Laksana, serta dengan OPD yang akan dilakukan Assesment untuk menyelesaikan penyusunan laporan kinerja OPD tepat waktu.



Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya/Anggaran

Berdasarkan uraian di atas disampaikan penjelasan, bahwa dalam hal penggunaan sumber daya/anggaran dapat dikategorikan sangat efektif, karena ada kegiatan pendukung yang dilaksanakan tanpa adanya pembiayaan.

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran strategis "Meningkatnya Hasil Evaluasi SAKIP SKPD" adalah :

- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
 - Kegiatan evaluasi LAKIP;
 - Kegiatan assesor LAKIP.

Sasaran 7 Meningkatnya SKPD yang Bebas Korupsi

Untuk mewujudkan sasaran tersebut di atas dianggarkan dana pendukung yang bersumber dari APBD tahun 2020 sebesar **Rp.494.876.900,00**. Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya Rasionalisasi berupa refocussing dan realokasi anggaran sehingga terjadi perubahan anggaran menjadi **Rp 201.649.000,00** dan telah terealisasi sebesar **Rp 191.040.935,00** atau **94,74%** dari pagu anggaran. Adapun rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pelaksanaan penguatan dan evaluasi penerapan SPIP	33.274.500	-	-	0
	Monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi	77.499.900	-	-	0
	Pencanangan	90.804.500	74.446.500	74.418.435	99,72



	Zona Integritas				
	Survey Penilaian Integritas	139.420.000	-	-	0
	Laporan LHKPN/LHKASN	153.878.000	127.202.500	116.622.500	91,68
TOTAL		494.876.900	201.649.000	191.040.935	94,74

Dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2019, maka terjadi peningkatan atau penurunan pada beberapa kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	2019 (%)	2020 (%)
Meningkatnya Implementasi Aksi Pencegahan Korupsi	Meningkatnya SKPD yang bebas korupsi	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pelaksanaan penguatan dan evaluasi penerapan SPIP	94	0
			Monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi	0	0
			Pencanangan Zona Integritas	96	99,72
			Survey Penilaian Integritas	0	0
			Laporan LHKPN/LHKASN	98,98	91,68

Kinerja Sasaran "Meningkatnya SKPD Yang Bebas Korupsi" dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP	SKPD	43	43	100	Output
2.	Jumlah SKPD yang menerapkan WASKAT	SKPD	43	0	0	Output
3.	Jumlah SKPD yang diusulkan sebagai Zona Integritas atau berstatus WBK/WBBM	SKPD	4	0	0	Output
4.	Prosentase pejabat yang telah menyampaikan LHKPN	Persentase	90%	97	107	Output
Capaian sasaran					51,75	



Dilihat dari capaian indikator sasaran output yang terdiri dari 4 indikator di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut dapat dikategorikan **Tidak Berhasil (51,75%)**.

Sedangkan Perbandingan Indikator Kinerja Output terhadap tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		+/-	%
			2019	2020		
1.	Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP	SKPD	43	43		100
2.	Jumlah SKPD yang menerapkan WASKAT					
	a. Laporan WASKAT	SKPD	43	0		0
	b. Indeks Aksi Pencegahan Korupsi	%	77	55	-22	71,43
3.	Jumlah SKPD yang diusulkan sebagai Zona Integritas atau berstatus WBK/WBBM	SKPD	0	0		0
4.	Prosentase pejabat yang telah menyampaikan LHKPN	Persentase	83	97	14	116

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja

1. Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP

Capaian SKPD yang menerapkan SPIP dilakukan berdasarkan jumlah SKPD yang sudah melakukan praktek-praktek dalam aspek pengendalian intern yang memadai. Walaupun tidak didukung dengan anggaran, pada tahun 2020 fokus penerapan SPIP dilakukan dengan jumlah OPD yang telah menyusun pengendalian risiko melalui pemenuhan dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dengan target sebanyak 43 OPD besar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. Pada tahun 2020 dari hasil monitoring dan evaluasi penyusunan RTP diperoleh capaian sebesar 100%.



2. Jumlah SKPD yang menerapkan WASKAT

Pada tahun 2020 penerapan WASKAT dalam bentuk monitoring dan supervisi kepatuhan OPD untuk menyampaikan laporan Waskat tidak lagi menjadi kebijakan atau keharusan yang bersifat mandatoris dalam kebijakan pengawasan dan diganti dengan monitoring dan evaluasi penerapan aksi pencegahan korupsi. Penambahan indikator mengacu pada kewajiban seluruh kabupaten untuk melaksanakan aksi pencegahan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Capaian pada tahun 2020 untuk 8 area intervensi pencegahan korupsi sesuai hasil assessment KPK adalah sebesar 44,78%. Terjadi penurunan capaian dari tahun sebelumnya diakibatkan beberapa sebab :

- Terjadinya rasionalisasi anggaran sehingga beberapa kegiatan tidak dapat terpenuhi.
- Lemahnya koordinasi tim aksi pencegahan korupsi yang melibatkan beberapa OPD terkait.

3. Jumlah SKPD yang diusulkan memperoleh predikat WBK

Capaian OPD yang berpredikat WBK belum tercapai (0%). Jumlah OPD yang dipersiapkan sebanyak 5 (lima) OPD dan pada tahun 2020 terdapat penambahan 1 OPD ZI yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Capaian jumlah pembinaan sebanyak 6 OPD tetapi belum bisa diusulkan untuk dilakukan berpredikat WBK karena terjadi perubahan kebijakan persyaratan pengajuan WBK dari Kementerian Pendayaan Aparatur dan RB.

4. Prosentasi Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN

Capaian kinerja kepatuhan LHKPN dan LHKASN sebesar 97% merupakan rata-rata dari kepatuhan LHKPN (100%) dan LHKASN (95%).

Laporan	Wajib Lapor	Realisasi	%
LHKPN	113	113	100%
LHKASN	5.841	5.552	95%
			97,5%



Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran strategis "Meningkatnya SKPD Yang Bebas Korupsi" adalah :

- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
 - Kegiatan penancangan zona integritas;
 - Kegiatan laporan LHKPN/LHKASN.



B. REALISASI ANGGARAN

1) Laporan Realisasi Anggaran dan Penjelasannya

Pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2020 pada Inspektorat Kabupaten Sintang dalam penggunaan anggaran Belanja Daerah baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung dari pagu anggaran sebesar **Rp. 10.878.564.475,24** terserap sebesar **Rp 10.462.285.320,10 (96%)** dengan rincian sebagai berikut:



Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.00.00.5.1] Belanja Tidak Langsung -					
5110101	Gaji pokok PNS/uang representasi	3.356.824.958,32	3.177.004.122,00	179.820.836,32	94,64%
5110102	Tunjangan keluarga	382.103.677,32	351.594.204,00	30.509.473,32	92,02%
5110103	Tunjangan jabatan	153.312.750,00	128.700.000,00	24.612.750,00	83,95%
5110104	Tunjangan fungsional	527.826.000,00	447.520.000,00	80.306.000,00	84,79%
5110105	Tunjangan fungsional umum	32.298.700,00	28.175.000,00	4.123.700,00	87,23%
5110106	Tunjangan beras	185.705.157,60	173.590.740,00	12.114.417,60	93,48%
5110107	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	11.750.000,00	5.104.636,00	6.645.364,00	43,44%
5110108	Pembulatan gaji	500.000,00	44.004,00	455.996,00	8,80%
5110109	Jaminan Kesehatan	142.701.363,00	137.327.785,00	5.373.578,00	96,23%
5110122	Jaminan Kematian	31.500.000,00	19.697.159,00	11.802.841,00	62,53%
5110123	Jaminan Keselamatan Kerja	12.600.000,00	6.565.689,00	6.034.311,00	52,11%
5110201	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	1.583.016.976,00	1.567.577.040,00	15.439.936,00	99,02%
Sub Jumlah		6.420.139.582,24	6.042.900.379,00	377.239.203,24	94,12%
0.40	PEMERINTAHAN UMUM				
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.01.001.5.2] Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan jasa surat menyurat					
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	4.800.000,00	4.353.000,00	447.000,00	90,68%
5220307	Belanja Paket/ Pengiriman	3.000.000,00	2.998.000,00	2.000,00	99,93%
Sub Jumlah		7.800.000,00	7.351.000,00	449.000,00	94,24%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.01.002.5.2] Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					
5220301	Belanja telepon/faksimili/Radio	3.600.000,00	1.521.356,00	2.078.644,00	42,26%
5220302	Belanja Air	3.520.000,00	2.320.699,00	1.199.301,00	65,93%
5220303	Belanja Listrik	120.000.000,00	97.989.238,10	22.010.761,90	81,66%
5220306	Belanja internet/bandwitch	14.400.000,00	11.708.000,00	2.692.000,00	81,31%
Sub Jumlah		141.520.000,00	113.539.293,10	113.539.293,00	80,23%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.01.006.5.2] Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional					
5220505	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	12.370.000,00	11.018.300,00	1.351.700,00	89,07%
5220507	Belanja Perpanjangan STNK Kendaraan Bermotor	750.000,00	0,00	750.000,00	0%
Sub Jumlah		13.120.000,00	11.018.300,00	2.101.700,00	83,98%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.01.008.5.2] Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan jasa kebersihan kantor					
5220104	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.614.755,00	4.604.755,00	10.000,00	99,78%
Sub Jumlah		4.614.755,00	4.604.755,00	10.000,00	99,78%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.01.010.5.2] Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan alat tulis kantor					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	60.202.525,00	60.202.525,00	0,00	100%



5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	26.812.500,00	26.812.500,00	0,00	100%
Sub Jumlah		88.665.025,00	88.665.025,00	0,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.01.011.5.2] Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100%
5220601	Belanja Penggandaan	46.167.000,00	46.167.000,00	0,00	100%
5220603	Belanja Cetak dan Barang Cetakan	10.774.752,00	10.774.752,00	0,00	100%
Sub Jumlah		58.591.752,00	58.591.752,00	0,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.01.012.5.2] Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					
5220102	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	4.839.200,00	4.839.200,00	0,00	100%
Sub Jumlah		4.839.200,00	4.839.200,00	0,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.01.015.5.2] Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					
5220305	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.780.000,00	6.780.000,00	0,00	100%
Sub Jumlah		6.780.000,00	6.780.000,00	0,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.01.017.5.2] Penyediaan makanan dan minuman - Penyediaan makanan dan minuman					
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	45.448.000,00	45.404.300,00	43.700,00	99,90%
Sub Jumlah		45.448.000,00	45.404.300,00	43.700,00	99,90%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.01.018.5.2] Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	100%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	214.605.000,00	214.564.776,00	40.224,00	99,98%
Sub Jumlah		221.255.000,00	221.214.776,00	40.224,00	99,98%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.01.019.5.2] Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah - Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah					
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.980.000,00	21.735.000,00	245.000,00	98,89%
Sub Jumlah		21.980.000,00	21.735.000,00	245.000,00	98,89%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.01.020.5.2] Penyediaan tenaga kontrak - Penyediaan tenaga kontrak					
5210201	Gaji Pegawai Tidak Tetap	113.100.000,00	112.100.000,00	1.000.000,00	99,12%
5210301	Jaminan Kesehatan Pegawai Tidak Tetap	11.486.400,00	9.815.316,00	1.671.084,00	85,45%
5210302	Jaminan Kematian Pegawai Tidak Tetap	1.728.000,00	1.398.672,00	329.328,00	80,94%
5210303	Jaminan Keselamatan Kerja Pegawai Tidak Tetap	576.000,00	296.700,00	279.300,00	51,51%
Sub Jumlah		126.890.400,00	123.610.688,00	3.279.712,00	97,42%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.01.021.5.2] Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas - Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas					
5220105	Belanja Bahan Bakar	1.828.500,00	1.828.500,00	0,00	100%



	Minyak/Gas				
Sub Jumlah		1.828.500,00	1.828.500,00	0,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.02.003.5.2] Pembangunan gedung kantor – pembangunan gedung kantor					
5232731	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian bangunan lainnya	0,00	0,00	0,00	0%
Sub Jumlah		0,00	0,00	0,00	0%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.02.010.5.2] Pengadaan mebeleur - Pengadaan mebeleur					
5231301	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	0%
5231303	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	0%
5231307	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	0,00	0%
Sub Jumlah		0,00	0,00	0,00	0%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.02.011.5.2] Pengadaan perangkat komputer dan printer - Pengadaan perangkat komputer dan printer					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100%
5210102	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100%
5210104	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100%
5210107	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	100%
5231204	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	177.090.000,00	177.090.000,00	0,00	100%
Sub Jumlah		206.040.000,00	206.040.000,00	0,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.02.012.5.2] Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor -					
5231106	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	16.000.000,00	15.636.000,00	364.000,00	97,72%
Sub Jumlah		16.000.000,00	15.636.000,00	364.000,00	97,72%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.02.022.5.2] Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0%
5220201	Belanja bahan baku pembangunan (swakelola)	26.002.000,00	26.002.000,00	0,00	100%
5220317	Belanja Jasa Tenaga Tukang	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	100%
Sub Jumlah		35.152.000,00	35.152.000,00	0,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.02.024.5.2] Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional					
5220501	Belanja Jasa Service	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100%
5220502	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.000.000,00	29.975.000,00	25.000,00	99,92%
5220503	Belanja Bahan Pelumas	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100%
Sub Jumlah		52.500.000,00	52.475.000,00	25.000,00	99,95%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.02.026.5.2] Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor					
5222002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.5000.000,00	12.5000.000,00	0,00	100%
Sub Jumlah		12.5000.000,00	12.5000.000,00	0,00	100%



[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.02.028.5.2] Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor					
5222002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100%
Sub Jumlah		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.02.030.5.2] Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer - Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer					
5222002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	100%
Sub Jumlah		23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.02.045.5.2] Penataan halaman kantor – Penataan halaman kantor					
5232733	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Halaman/Tempat Parkir	150.000.000,00	149.890.000,00	110.000,00	99,93%
Sub Jumlah		150.000.000,00	149.890.000,00	110.000,00	99,93%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.05.001.5.2] Pendidikan dan pelatihan formal - Pendidikan dan pelatihan formal					
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	0%
5221701	Belanja kontribusi kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	0,00	0,00	0%
Sub Jumlah		0,00	0,00	0,00	0%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.05.004.5.2] Penilaian angka kredit - Penilaian angka kredit					
5210105	Honorarium Tim Kegiatan	26.200.000,00	26.200.000,00	0,00	100%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	566.400,00	566.400,00	0,00	100%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	100%
5220601	Belanja Penggandaan	452.100,00	452.100,00	0,00	100%
5220603	Belanja Cetak dan Barang Cetakan	660.000,00	660.000,00	0,00	100%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	3.933.000,00	3.933.000,00	0,00	100%
Sub Jumlah		33.241.500,00	33.241.500,00	0,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.06.001.5.2] Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	494.800,00	494.800,00	0,00	100%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	1.237.500,00	1.237.500,00	0,00	100%
5220601	Belanja Penggandaan	179.100,00	179.100,00	0,00	100%
5220602	Belanja Penjilidan	225.000,00	225.000,00	0,00	100%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	1.704.300,00	1.704.300,00	0,00	100%
Sub Jumlah		3.840.700,00	3.840.700,00	0,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.06.002.5.2] Penyusunan pelaporan keuangan semesteran - Penyusunan pelaporan keuangan semesteran					
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	601.600,00	601.600,00	0,00	100%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	962.500,00	962.500,00	0,00	100%
5220601	Belanja Penggandaan	245.100,00	245.100,00	0,00	100%
5220602	Belanja Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	100%



5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	1.311.000,00	1.311.000,00	0,00	100%
Sub Jumlah		3.270.200,00	3.270.200,00	0,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.06.019.5.2] Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah – Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah					
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	652.100,00	652.100,00	0,00	100%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	962.500,00	962.500,00	0,00	100%
5220601	Belanja Penggandaan	245.100,00	245.100,00	0,00	100%
5220602	Belanja Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	100%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	1.311.000,00	1.311.000,00	0,00	100%
Sub Jumlah		3.154.200,00	3.154.200,00	0,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.06.021.5.2] Penyusunan program kerja pengawasan tahunan – Penyusunan program kerja pengawasan tahunan					
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	534.300,00	534.300,00	0,00	100%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	605.000,00	605.000,00	0,00	100%
5220601	Belanja Penggandaan	215.400,00	215.400,00	0,00	100%
5220602	Belanja Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	100%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	2.622.000,00	2.622.000,00	0,00	100%
Sub Jumlah		4.126.700,00	4.126.700,00	0,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.06.022.5.2] Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun – Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun					
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	652.100,00	652.100,00	0,00	100%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	880.000,00	880.000,00	0,00	100%
5220601	Belanja Penggandaan	161.100,00	161.100,00	0,00	100%
5220602	Belanja Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	100%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	1.311.000,00	1.311.000,00	0,00	100%
Sub Jumlah		3.154.200,00	3.154.200,00	0,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.002.5.2] Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah - Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	100%
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	306.630.000,00	305.280.000,00	1.350.000,00	99,56%
Sub Jumlah		316.280.000,00	314.930.000,00	1.350.000,00	99,57%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.004.5.2] Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya -					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.505.000,00	2.505.000,00	0,00	100%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	2.428.800,00	2.428.800,00	0,00	100%
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	89.870.000,00	88.640.000,00	1.230.000,00	98,63%
Sub Jumlah		95.903.800,00	94.673.800,00	1.230.000,00	98,72%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.005.5.2] Inventarisasi temuan pengawasan -					
5210105	Honorarium Tim Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0%



5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	0%
5220210	Belanja Bahan Dekorasi	0,00	0,00	0,00	0%
5220601	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0%
5220602	Belanja Penjilidan	0,00	0,00	0,00	0%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	0%
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00	0%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.460.000,00	26.473.000,00	987.000,00	96,41%
Sub Jumlah		27.460.000,00	26.473.000,00	987.000,00	96,41%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.008.5.2] Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan - Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	835.000,00	835.000,00	0,00	100%
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	99.730.000,00	99.730.000,00	0,00	100%
Sub Jumlah		100.565.000,00	100.565.000,00	0,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.009.5.2] Audit Alokasi Dana Desa -					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	100%
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	235.050.000,00	235.050.000,00	0,00	100%
Sub Jumlah		243.400.000,00	243.400.000,00	0,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.010.5.2] Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah - Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	772.800,00	772.800,00	0,00	100%
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	68.385.000,00	68.350.000,00	35.000,00	99,94%
Sub Jumlah		70.807.800,00	70.772.800,00	35.000,00	99,95%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.011.5.2] Evaluasi LAKIP - Evaluasi LAKIP					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	100%
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	159.930.000,00	159.850.000,00	80.000,00	99,95%
Sub Jumlah		161.860.000,00	161.780.000,00	80.000,00	99,95%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.012.5.2] Pemeliharaan program SIMHP - Pemeliharaan program SIMHP					
5220311	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100%
Sub Jumlah		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.013.5.2] Inventarisasi penetapan TPTGR - Inventarisasi penetapan TPTGR					
5210105	Honorarium Tim Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	450.600,00	450.600,00	0,00	100%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	962.500,00	962.500,00	0,00	100%
5220601	Belanja Penggandaan	448.500,00	448.500,00	0,00	100%
5220602	Belanja Penjilidan	450.000,00	450.000,00	0,00	100%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	5.244.000,00	4.370.000,00	874.000,00	83,33%



5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0%
Sub Jumlah		7.555.600,00	6.681.600,00	874.000,00	88,43%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.014.5.2] Review RKA SKPD - Review RKA SKPD					
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	1.311.000,00	1.305.400,00	5.600,00	99,57%
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	55.100.000,00	54.950.000,00	150.000,00	99,73%
Sub Jumlah		56.411.000,00	56.255.400,00	155.600,00	99,72%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.015.5.2] Pencanaan zona integritas - Pencanaan zona integritas					
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	1.357.000,00	1.357.000,00	0,00	100%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	412.500,00	412.500,00	0,00	100%
5220601	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	100%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	6.555.000,00	6.555.000,00	0,00	100%
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	52.640.000,00	52.620.000,00	20.000,00	99,96%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.582.000,00	12.573.935,00	8.065,00	99,94%
Sub Jumlah		74.446.500,00	74.418.435,00	28.065,00	99,96%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.016.5.2] Sapu bersih pungutan liar - Sapu bersih pungutan liar					
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0%
5220601	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	0%
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00	0%
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.795.000,00	8.795.000,00	0,00	100%
Sub Jumlah		8.795.000,00	8.795.000,00	0,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.017.5.2] Probity Audit					
5220101	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	0%
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0%
Sub Jumlah		0,00	0,00	0,00	0%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.018.5.2] Penanganan Laporan Grafifikasi					
5220101	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	0%
5220601	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	0%
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	0%
Sub Jumlah		0,00	0,00	0,00	0%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.019.5.2] Penilaian mandiri reformasi birokrasi - Penilaian mandiri reformasi birokrasi					
5210105	Honorarium Tim Kegiatan	10.010.000,00	10.010.000,00	0,00	100%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	287.500,00	287.500,00	0,00	100%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	1.495.000,00	1.495.000,00	0,00	100%



5220601	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	100%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	1.311.000,00	1.311.000,00	0,00	100%
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.622.000,00	2.622.000,00	0,00	100%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.350.000,00	6.588.596,00	761.404,00	89,64%
Sub Jumlah		23.525.500,00	22.764.096,00	761.404,00	96,76%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.020.5.2] Pelaksanaan penguatan dan evaluasi penerapan SPIP					
5210106	Honorarium Pengajar / Instruktur / Narasumber / Pelatih	0,00	0,00	0,00	0%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	0%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	0%
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00	0%
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	0%
5222501	Belanja Transportasi	0,00	0,00	0,00	0%
5222502	Belanja Akomodasi	0,00	0,00	0,00	0%
5222503	Belanja uang saku	0,00	0,00	0,00	0%
Sub Jumlah		0,00	0,00	0,00	0%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.021.5.2] Laporan LHKPN/LHAKSN - Laporan LHKPN/LHAKSN					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0%
5210105	Honorarium Tim Kegiatan	38.450.000,00	28.550.000,00	9.900.000,00	74,25%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	1.357.000,00	1.357.000,00	0,00	100%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	544.500,00	544.500,00	0,00	100%
5220601	Belanja penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	1.311.000,00	1.311.000,00	0,00	100%
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	84.940.000,00	84.260.000,00	680.000,00	99,20%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	0%
Sub Jumlah		127.202.500,00	116.622.500,00	10.580.000,00	91,68%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.022.5.2] Pelaksanaan pengawasan internal berkala pada Dinas dan LTD - Pelaksanaan pengawasan internal berkala pada Dinas dan LTD					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.285.000,00	3.285.000,00	0,00	100%
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	279.065.000,00	279.050.000,00	15.000,00	99,99%
Sub Jumlah		282.350.000,00	282.335.000,00	15.000,00	99,99%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.027.5.2] Review Daftar Rencana Kebutuhan Barang Miik Daerah					
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0%
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0%
Sub Jumlah			0,00	0,00	0,00
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.033.5.2] Pelaksanaan					



Pengawasan Internal Berkala pada Kecamatan dan Kelurahan					
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0%
Sub Jumlah		0,00	0,00	0,00	0%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.034.5.2] Layanan aspirasi pengaduan online rakyat sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N) - Lapor (SPAN)					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0%
5210105	Honorarium Tim Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	2.598.200,00	2.598.200,00	0,00	100%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	4.455.000,00	4.455.000,00	0,00	100%
5220304	Belanja Jasa Talk Show (Siaran)/Iklan/pengumuman Media	0,00	0,00	0,00	0%
5220601	Belanja Penggandaan	330.000,00	330.000,00	0,00	100%
5220602	Belanja Penjilidan	75.000,00	75.000,00	0,00	100%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	0%
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00	0%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.480.000,00	10.019.000,00	461.000,00	95,60%
5222006	Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100%
Sub Jumlah		167.938.200,00	167.477.200,00	461.000,00	99,73%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.035.5.2] Monitoring/ Tindak Lanjut Pengawasan - Monitoring/ Tindak Lanjut Pengawasan					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.650.000,00	8.685.000,00	965.000,00	90,00%
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	302.910.000,00	302.895.000,00	15.000,00	100%
Sub Jumlah		312.560.000,00	311.580.000,00	980.000,00	99,69%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.038.5.2] Pengawasan dana bantuan operasional sekolah (BOS) -					
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35.060.000,00	35.060.000,00	0,00	100%
Sub Jumlah		35.060.000,00	35.060.000,00	0,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.039.5.2] Pengawasan dana alokasi khusus (DAK) -					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.505.000,00	2.505.000,00	0,00	100%
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	86.725.000,00	86.605.000,00	120.000,00	99,86%
Sub Jumlah		89.230.000,00	89.110.000,00	120.000,00	99,87%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.040.5.2] Survey Penilaian Integritas					
5210103	Honorarium Moderator	0,00	0,00	0,00	0%
5210105	Honorarium Tim Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0%
5210106	Honorarium Pengajar / Instruktur / Narasumber / Pelatih	0,00	0,00	0,00	0%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	0%



5220329	Belanja jasa kerjasama dengan lembaga Pemerintah	0,00	0,00	0,00	0%
5220601	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0%
5220602	Belanja penjiilidan	0,00	0,00	0,00	0%
5220603	Belanja cetak dan barang cetakan	0,00	0,00	0,00	0%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	0%
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00	0%
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	0%
Sub Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.043.5.2] Monitoring dan Evaluasi Aksi Pencegahan Korupsi					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	0%
5220601	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0%
5220602	Belanja Penjiilidan	0,00	0,00	0,00	0%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	0%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	0%
Sub Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.044.5.2] Review Penyerapan Anggaran -					
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	0%
5220601	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0%
5220602	Belanja Penjiilidan	0,00	0,00	0,00	0%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	0%
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.875.000,00	12.875.000,00	0,00	100%
Sub Jumlah		12.875.000,00	12.875.000,00	0,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.046.5.2] Penyelenggaraan Koordinasi TP4D					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	0%
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0%
Sub Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.047.5.2] Pemeriksaan Pajak Pusat dan PNB					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	0,00



Sub Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.048.5.2] Penanganan Aksi Benturan Kepentingan					
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	0%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	0%
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00	0%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	0%
Sub Jumlah		0,00	0,00	0,00	0%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.050.5.2] Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Reviu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)					
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	100%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	1.455.000,00	1.455.000,00	0,00	100%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	1.311.000,00	1.311.000,00	0,00	100%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	65.400.000,00	62.830.000,00	2.570.000,00	96,07%
Sub Jumlah		69.241.000,00	66.671.000,00	2.570.000,00	96,29%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.051.5.2] Asesor Penyusunan LAKIP					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0%
5210106	Honorarium Pengajar/Instruktur/Narasumber /Pelatih	0,00	0,00	0,00	0%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	0%
5220601	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0%
5220602	Belanja Penjilidan	0,00	0,00	0,00	0%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	0%
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00	0%
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	198.940.000,00	198.775.000,00	165.000,00	99,92%
5222501	Belanja Transportasi	0,00	0,00	0,00	0%
5222502	Belanja Akomodasi	0,00	0,00	0,00	0%
Sub Jumlah		198.940.000,00	198.775.000,00	165.000,00	99,92%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.052.5.2] Pengawasan Dalam Rangka Penanganan Bencana					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	47.840.000,00	47.840.000,00	0,00	100%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	660.000,00	660.000,00	0,00	0%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	5.416.500,00	5.393.500,00	23.000,00	99,58%
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	547.510.000,00	546.510.000,00	1.000.000,00	99,82%
Sub Jumlah		603.076.500,00	602.053.500,00	1.023.000,00	99,83%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.18.001.5.2] Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan - Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa					



dan aparatur pengawasan					
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.412.868,00	15.237.868,00	175.000,00	98,86%
5221701	Belanja kontribusi kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12.490.000,00	12.490.000,00	0,00	100%
Sub Jumlah		27.902.868,00	27.727.868,00	175.000,00	99,37%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.18.002.5.2] Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja - Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja					
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.183.793,00	22.138.793,00	0,00	100%
5221701	Belanja kontribusi kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	8.040.000,00	8.040.000,00	0,00	100%
Sub Jumlah		30.178.793,00	30.178.793,00	0,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.18.004.5.2] Peningkatan Kapabilitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan					
5210105	Honorarium tim kegiatan	0,00	0,00	0,00	0%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	0%
5220310	Belanja jasanarasumber/widyaiswara/pe mbiacara/praktisi	0,00	0,00	0,00	0%
5220601	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0%
5220602	Belanja Penjilidan	0,00	0,00	0,00	0%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	0%
5222501	Belanja transportasi	0,00	0,00	0,00	0%
5222502	Belanja akomodasi	0,00	0,00	0,00	0%
Sub Jumlah		0,00	0,00	0,00	0%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.18.004.5.2] Pelaksanaan penguatan kapabilitas APIP - Pelaksanaan penguatan kapabilitas APIP					
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	584.500,00	584.500,00	0,00	100%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	920.000,00	920.000,00	0,00	100%
5220601	Belanja Penggandaan	399.900,00	399.900,00	0,00	100%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	665.500,00	665.500,00	0,00	100%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.320.000,00	13.855.000,00	465.000,00	96,75%
Sub Jumlah		16.879.900,00	16.414.900,00	465.000,00	97,25%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.19.002.5.2] Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan - Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan					
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	262.300,00	262.300,00	0,00	100%
5220601	Belanja Penggandaan	283.500,00	283.500,00	0,00	100%
5220602	Belanja Penjilidan	105.000,00	105.000,00	0,00	100%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	1.311.000,00	1.311.000,00	0,00	100%
Sub Jumlah		1.961.800,00	1.961.800,00	0,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.19.003.5.2] Penyusunan laporan pelaksanaan program pengawasan semesteran dan tahunan - Penyusunan laporan pelaksanaan program pengawasan semesteran dan tahunan					
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	255.000,00	255.000,00	0,00	100%



5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	797.500,00	797.500,00	0,00	100%
5220601	Belanja Pengandaan	274.500,00	274.500,00	0,00	100%
5220602	Belanja Penjilidan	55.000,00	55.000,00	0,00	100%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	874.000,00	874.000,00	0,00	100%
Sub Jumlah		2.256.000,00	2.256.000,00	0,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.24.18.5.2]					
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	0%
5220210	Belanja dekorasi	0,00	0,00	0,00	0%
5220705	Belanja sewa tempat pameran	0,00	0,00	0,00	0%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	0%
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00	0%
Sub Jumlah		0,00	0,00	0,00	0%
Jumlah		10.878.564.475,24	10.443.597.924,10	434.966.551,14	96%

2) Anggaran dan Realisasi Program dan Sasaran Strategis Tahun 2020

Upaya yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan keberhasilan visi dan misi dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Sintang tahun 2017-2021 dilaksanakan dengan program dan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 4.458.424.893,00 dan realisasi sebesar Rp. 4.401.097.545,51 atau 87,15 % dengan kriteria sebagai berikut :

Sasaran 1 Meningkatnya Profesionalisme dan Kapasitas Aparat Pengawas					
Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	6.800.000	7.800.000	7.351.000	94,24
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139.500.000	141.520.000	113.539.293,10	80,23
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan	16.990.000	13.120.000	11.018.300	83,98
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.614.755	4.614.755	4.604.755	99,78
	Penyediaan ATK	50.378.725	88.665.025	88.665.025	100
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	225.560.000	0	0	0
	Penilaian angka kredit jabatan fungsional auditor	30.941.500	33.241.500	33.241.500	100
Peningkatan	Pelatihan	181.250.000	27.902.868	27.727.868	99,37



Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan				
	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	381.430.000	30.178.793	30.178.793	100
	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengawasan	66.754.320	0	0	0
	Pelaksanaan penguatan kapabilitas APIP	16.879.900	16.879.900	16.414.900	97,25
TOTAL		1.120.099.200	363.922.841	332.741.434	91,43
Sasaran 2 Meningkatnya Jumlah Regulasi/Kebijakan Pengawasan Yang Diterbitkan					
Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.211.590	58.591.752	58.591.752	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.091.200	4.839.200	4.839.200	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.780.000	6.780.000	5.760.000	84,96
	Penyediaan Makanan dan Minuman	33.561.600	45.448.000	45.404.300	99,90
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	525.420.000	221.255.000	221.214.776	99,98
	Pameran pembangunan	45.520.200	0	0	0
	Rapat-Rapat Koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	21.980.000	21.980.000	21.735.000	98,89
	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	19.500.000	1.828.500	1.825.264	99,82
	Jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran (tenaga kontrak)	143.390.400	126.890.400	123.610.688	97,42



Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.840.700	3.840.700	3.840.700	100
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	3.270.200	3.270.200	3.270.200	100
	Penyusunan rencana kerja SKPD	3.154.200	3.154.200	3.154.200	100
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3.154.200	3.154.200	3.154.200	100
Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	1.961.800	1.961.800	1.961.800	100
	Penyusunan laporan pelaksanaan program pengawasan semesteran dan tahunan	2.256.000	2.256.000	2.256.000	100
TOTAL		858.092.090	505.249.952	500.618.080	99,08
Sasaran 3 Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan					
Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Monitoring/ Pemantauan Tindak Lanjut	312.560.000	312.560.000	311.580.000	99,69
	Inventarisasi Temuan Pengawasan	259.871.680	27.460.000	26.473.000	96,41
	Pemeliharaan Program SIMHP	6.000.000	3.000.000	3.000.000	100
	Inventarisasi Penetapan TP-TGR	96.880.600	7.555.600	6.681.600	88,43
TOTAL		675.312.200	350.575.600	347.734.600	99,19
Sasaran 4 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pengawasan Berkala					
Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Gedung Kantor	16.000.000	16.000.000	15.636.000	97,73
	Pembangunan Gedung Kantor	200.000.000	-	-	-
	Pengadaan Meubelair	44.205.000	-	-	-



	Pengadaan Perangkat Komputer Printer	206.040.000	383.130.000	206.040.000	53,78
	Penataan Halaman Kantor	100.000.000	150.000.000	149.890.000	99,95
	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	35.252.000	35.152.000	35.152.000	100
	Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Operasional	52.500.000	52.500.000	52.475.000	100
	Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12.500.000	12.500.000	12.500.000	100
	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100
	Pemeliharaan Rutin Perangkat Komputer Printer	23.250.000	23.250.000	23.250.000	100
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala pada kesekretariatan, kecamatan dan kelurahan	167.360.000	-	-	-
	Audit ADD	404.190.000	243.400.000	243.400.000	100
	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala pada dinas dan lembaga teknis daerah	357.020.000	282.350.000	282.335.000	100
	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	100.565.000	100.565.000	100.565.000	100
	Reviu Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	77.122.800	70.807.800	70.772.800	99,95
	Reviu Rencana Kerja & Anggaran	56.411.000	56.411.000	56.255.400	99,72
	Saber Pungli	131.211.300	8.795.000	8.795.000	100
	Probit Audit	35.595.700	-	-	-
	Penanganan Laporan Gratifikasi	48.093.400	-	-	-
	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	43.305.500	23.525.500	22.764.096	96,76



	Pemeriksaan Pajak Pusat dan PNB	75.970.000	-	-	-
	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan	4.126.700	4.126.700	4.126.700	100
	Pengawasan Dana Alokasi Khusus	140.575.000	89.230.000	89.110.000	99,87
	Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah	105.430.000	35.060.000	35.060.000	100
	Reviu Daftar Rencana Kebutuhan Barang Daerah	38.595.700	-	-	-
	Reviu RPJMD dan RKPD	44.241.000	69.241.000	66.671.000	96,29
	Reviu Penyerapan Anggaran	40.390.000	12.875.000	12.875.000	100
	Pengawasan Dalam Rangka Penanganan Bencana	-	603.076.500	602.053.500	99,83
TOTAL		2.561.150.100	2.273.195.500	2.090.926.496	91,98
Sasaran 5 Meningkatnya Penyelesaian Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti Dengan Pemeriksaan					
Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah	386.200.000	316.280.000	314.930.000	99,57
	Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan dibawahnya	73.773.800	95.903.800	94.673.800	98,72
	Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)	252.969.200	167.938.200	167.477.200	99,73
	Penanganan Aksi Benturan Kepentingan	312.531.000	-	-	0
	Koordinasi TP4D	80.560.000	-	-	0



TOTAL		1.106.034.000	580.122.000	577.081.000	99,34
Sasaran 6 Meningkatnya Hasil Evaluasi SAKIP SKPD					
Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Evaluasi LAKIP	408.415.000	161.860.000	161.780.000	99,95
	Assesor LAKIP	275.093.200	198.940.000	198.775.000	99,92
TOTAL		683.508.200	360.800.000	360.555.000	99,93
Sasaran 6 Meningkatnya SKPD yang Bebas Korupsi					
Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pelaksanaan penguatan dan evaluasi penerapan SPIP	33.274.500	-	-	0
	Monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi	77.499.900	-	-	0
	Pencanangan Zona Integritas	90.804.500	74.446.500	74.418.435	99,72
	Survey Penilaian Integritas	139.420.000	-	-	0
	Laporan LHKPN/LHKASN	153.878.000	127.202.500	116.622.500	91,68
TOTAL		494.876.900	201.649.000	191.040.935	94,74
SUB TOTAL		7.499.072.690,00	4.458.424.893,00	4.401.097.545,51	87,15



BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020 secara umum dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun 2020 merupakan media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban serta dana yang dipergunakan selama tahun 2020.

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 7 (tujuh) sasaran dan 15 (lima belas) indikator kinerja, secara keseluruhan belum mencapai target sebagaimana ditetapkan dalam Renstra. Secara umum hal ini sangat dipengaruhi oleh adanya pandemi COVID 19 yang berakibat pada pengurangan anggaran (refocusing dan realokasi anggaran) dan secara langsung berpengaruh terhadap pencapaian target seluruh kegiatan yang terdampak refocussing.

Selain karena pengurangan anggaran, dalam pelaksanaan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan banyak ditemui hambatan/kendala. Adapun langkah-langkah antisipasi dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada tahun mendatang adalah:

1. Mengirim PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti diklat sertifikasi Jabatan Fungsional maupun diklat struktural dan teknis.
2. Mengadakan penambahan sarana dan prasarana pendukung guna menunjang kegiatan pemeriksaan.
3. Menerapkan PKPT berbasis risiko dan pembagian penugasan dengan mempertimbangkan beban kerja, jumlah SDM dan kompetensi.
4. Menyusun program kerja pemeriksaan berdasarkan skala prioritas.
5. Menerapkan Standar Operasional Prosedur disetiap pelaksanaan pengawasan.
6. Melaksanakan monitoring dan pemutakhiran data terhadap temuan-temuan pengawasan yang belum ditindaklanjuti, serta dilakukan kegiatan gelar pengawasan yang direncanakan 2 (dua) kali setahun.
7. Meningkatkan koordinasi antara anggota TP-TGR agar kasus-kasus pelanggaran yang penyelesaiannya direkomendasikan melalui jalur TP-TGR dapat segera ditindaklanjuti.



Akhirnya dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan acuan atau bahan evaluasi bagi perbaikan kinerja Inspektorat Kabupaten Sintang sehingga dapat lebih ditingkatkan.

☞☞☞